

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN 2020 - 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN 2020 - 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 259/Kpts/RC.020/M/05/2020

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian Pertanian perlu menyusun Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, dengan sistematika:

1. Pendahuluan;
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian;
3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan;
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan
5. Penutup,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kementerian Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai:

1. acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
2. acuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Lingkungan Kementerian Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai 2024; dan
3. acuan dalam penyusunan Renstra unit organisasi eselon I, eselon II, serta Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian untuk periode 5 (lima)

tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

- KEEMPAT : Perubahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 dapat dilakukan dalam hal:
1. terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra Kementerian Pertanian;
 2. tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Renstra Kementerian Pertanian bersifat indikatif.
- KEENAM : Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Renstra dituangkan dalam Renja Kementerian Pertanian.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 04 Mei 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



ADHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 259/Kpts/RC.020/M/05/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN 2020-2024



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN RI	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. KONDISI UMUM	4
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	16
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN	37
1. VISI	38
2. MISI	40
3. TUJUAN	41
4. SASARAN STRATEGIS	42
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	47
1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	48
2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERTANIAN	57
3. KERANGKA REGULASI	80
4. KERANGKA KELEMBAGAAN	82
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	89
1. TARGET KINERJA	90
2. KERANGKA PENDANAAN	94
BAB V. PENUTUP	97
LAMPIRAN	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Populasi dan Produksi Daging Sapi dan Kerbau 2015-2019	15
Tabel 2.	Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia berdasarkan Wilayah dan Kuintil Pengeluaran 2019	22
Tabel 3.	Total Anggaran Kedaulatan Pangan di Indonesia 2015-2020 (Rp Triliun)	30
Tabel 4.	Penguatan Jaminan Usaha Korporasi Petani	72
Tabel 5.	Program dan Sasaran Program Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	77
Tabel 6.	Program dan Sasaran Program Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024	79
Tabel 7.	Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian 2020-2024 ...	91
Tabel 8.	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Nilai dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Sempit 2015-2019	5
Gambar 2.	Kontribusi Sektor Pertanian Sempit Terhadap PDB Nasional (ADH Berlaku), 2015–2019	6
Gambar 3.	Tenaga Kerja Pertanian Sempit 2015–2019	7
Gambar 4.	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Petani 2015-2019	8
Gambar 5.	Neraca Perdagangan Pertanian 2015-2019	8
Gambar 6.	Realisasi Investasi PMDN dan PMA Sektor Pertanian Sempit 2014-2019	9
Gambar 7.	Produksi Padi Menggunakan Metode SP-Padi dan KSA, 2015-2017 dan 2018-2019	10
Gambar 8.	Produksi Jagung 2015-2019	11
Gambar 9.	Produksi Kedelai 2015-2019	12
Gambar 10.	Produksi Cabai dan Bawang Merah 2015-2019	13
Gambar 11.	Produksi Tebu 2015-2019	14
Gambar 12.	Nilai <i>Global Food Security Index Indonesia</i> 2015-2019	16
Gambar 13.	Proyeksi <i>Dependency Ratio</i> dan Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2015-2045	20
Gambar 14.	Rata-rata Konsumsi per kapita Beberapa Macam Bahan Pangan Penting di Indonesia 2007-2018 (Sumber: BPS Tahun 2018)	22
Gambar 15.	Defisit Neraca Perdagangan Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	24
Gambar 16.	Luas Lahan Baku Sawah	25
Gambar 17.	Luas Lahan Pertanian yang dikuasai Rumah Tangga Usaha Pertanian	26



Gambar 18. Pendidikan dan Umur Petani Tahun 2018 (Sumber: BPS, 2019)	27
Gambar 19. Penghasilan Utama Penduduk Perdesaan (Sumber: BPS, 2018)	28
Gambar 20. Sebaran Penghasilan di Sektor Pertanian Berdasarkan Komoditas (Sumber: BPS,2018)	29
Gambar 21. Petani Pengguna Internet dan Sinyal Internet Perdesaan Tahun 2018 (Sumber: BPS, 2018)	32
Gambar 22. Data Puso akibat Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Padi 2015-2019	33
Gambar 23. Realisasi KUR Sektor Pertanian 2016-2019 (Sumber: SIKP, Kementerian Keuangan)	34
Gambar 24. Peta Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	43
Gambar 25. Struktur Organisasi Kementerian Pertanian	85





BAB

1

PENDAHULUAN





Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 322 juta jiwa, terbesar kelima di dunia setelah Tiongkok, India, Nigeria dan Amerika (*United Nations, 2017*).

Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Secara nasional, diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7 - 6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi ditandai dengan perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya stabilisasi inflasi, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran,

turunnya tingkat rasio gini dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Orientasi pertumbuhan ekonomi bukan hanya mengejar kepada target pertumbuhan, tetapi bagaimana kualitas dan distribusi ekonomi (kesejahteraannya) semakin merata. Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam 5 (lima) tahun ke depan melalui proses transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan transformasi sektor jasa. Paradigma pembangunan pertanian yang hanya menitikberatkan di sektor hulu, perlu diperbaharui dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh atau disebut pertanian untuk pembangunan (*Agriculture for Development*). Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju *zero waste* (tidak ada yang disia-siakan).

Pembangunan pertanian yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 dan kelanjutan dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN keempat (2020-2024) ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang



termasuk di sektor pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian periode 2020-2024.

1. KONDISI UMUM

Selama periode 2015-2019, sektor pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja **“NAWACITA”** mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Untuk mencapai target dalam Nawacita, Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi: (1) pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani; dan (6) akuntabilitas kinerja aparaturnya yang baik.

Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan strategi tersebut, di antaranya: (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan;

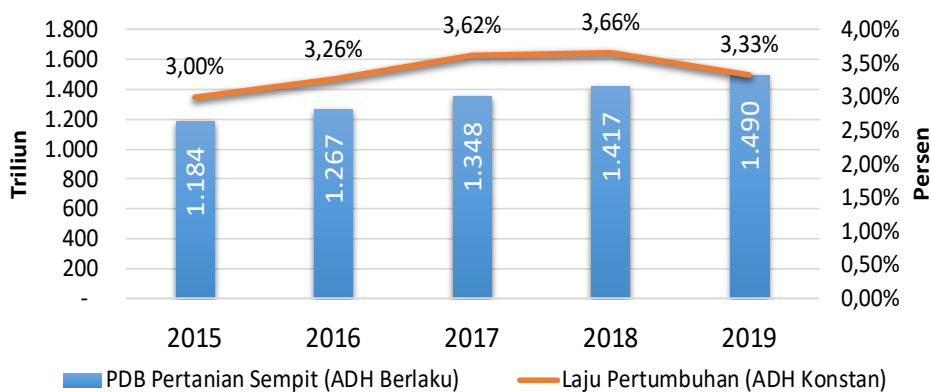
(2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) penguatan kelembagaan petani; (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan; (6) pengembangan serta penguatan bioindustri dan bioenergi; dan (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian. Penguatan kondisi ketahanan pangan dan peningkatan daya saing dapat dilihat pada kondisi umum dan permasalahan sektor pertanian. Adapun kondisi umum pembangunan pertanian di Indonesia selama tahun 2015-2019 dapat dilihat dari capaian indikator makro, produksi komoditas strategis pertanian dan capaian kinerja pertanian lainnya sebagai berikut :

1.1. Indikator Makro Pertanian

Indikator makro pertanian meliputi PDB, Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Tukar Petani (NTP), Neraca Perdagangan dan Investasi.

a. PDB

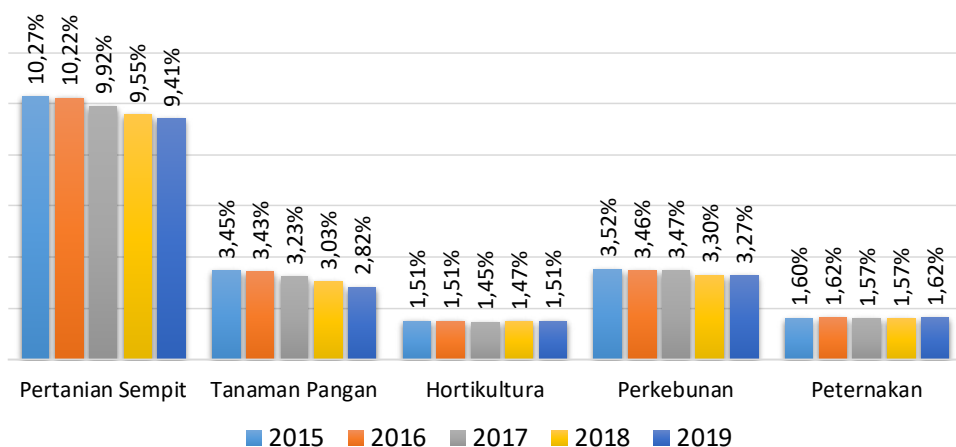
Selama kurun waktu 2015-2019, PDB pertanian menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan PDB mencapai 3,6%, naik cukup tinggi jika dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya tumbuh 3,0%. Pada tahun 2019, terjadi penurunan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan penurunan laju peningkatan produksi tanaman pangan akibat musim kemarau yang panjang.



Gambar 1. Nilai dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Sempit 2015-2019



Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang PDB yang cukup besar meskipun perannya semakin menurun karena pertumbuhan di sektor non pertanian pertumbuhannya relatif lebih cepat. Pada tahun 2015, sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit (subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) terhadap PDB adalah 10,27%. Pada tahun 2019 sumbangan sektor pertanian terhadap PDB turun menjadi 9,41%. Menurunnya sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit menunjukkan adanya transformasi perekonomian nasional, yang awalnya didominasi oleh hasil produk primer pertanian dalam arti sempit bergeser ke sektor lainnya.

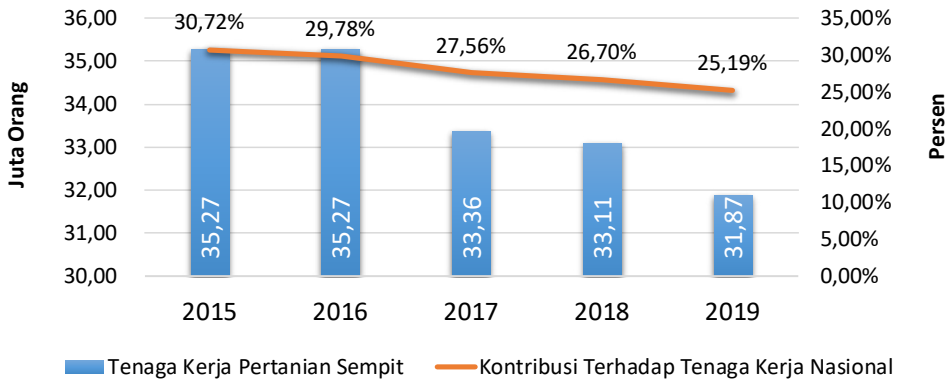


Gambar 2 Kontribusi Sektor Pertanian Sempit Terhadap PDB Nasional (ADH Berlaku), 2015–2019

b. Tenaga Kerja Pertanian

Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2019 masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia masih dominan bekerja di sektor pertanian dengan pangsa pasar tenaga kerja sebesar 25,19% pada tahun 2019 atau 31,87 juta orang dari total angkatan kerja 133,56 juta orang.



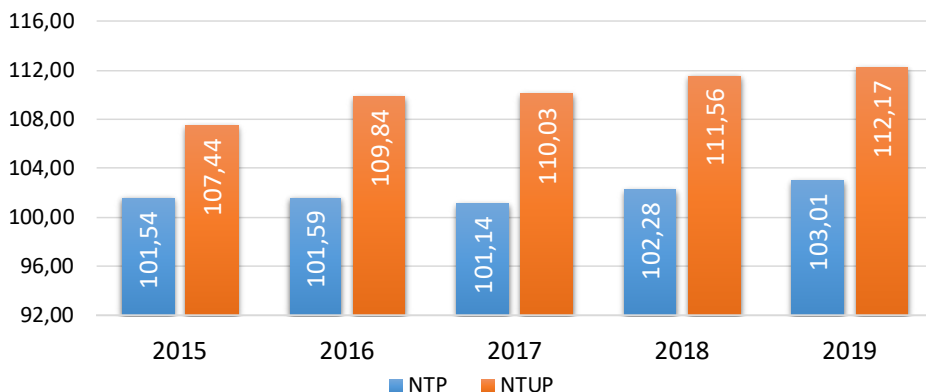
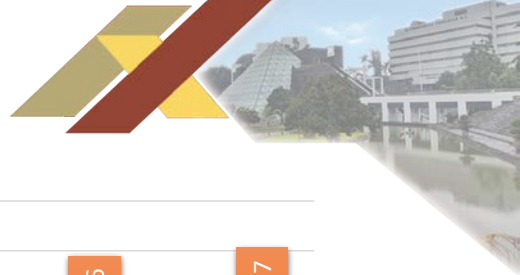


Gambar 3. Tenaga Kerja Pertanian Sempit 2015–2019

c. NTP

NTP merupakan salah satu indikator relatif yang menunjukkan kemampuan petani dalam meningkatkan pendapatannya. NTP dihitung dengan cara membandingkan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP berguna untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP juga bisa sebagai indikasi tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Pada tahun 2019, NTP mengalami peningkatan sebesar 0,91% dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan NTP terbesar terjadi pada subsektor Hortikultura yaitu 2,54%, sedangkan peningkatan terendah pada subsektor Peternakan sebesar 0.63%. Sementara itu, penurunan NTP terjadi pada Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar -0,15%.

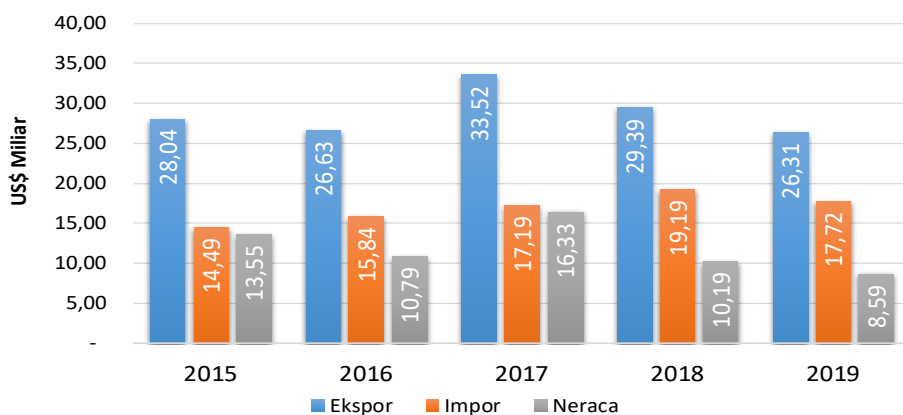
Selain NTP, Pemerintah menggunakan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) untuk mengukur tingkat keberhasilan usaha pertanian berdasarkan pendapatan yang diterima dari kenaikan/penurunan harga produksi pertanian yang dihasilkan dibandingkan dengan kenaikan/penurunan harga barang/jasa untuk proses produksi yang dibeli. Data BPS menyebutkan tahun 2015 nilai NTUP (pertanian sempit tanpa perikanan) hanya sebesar 107,44 dan secara signifikan meningkat hingga pada tahun 2019 dengan nilai NTUP sebesar 112,17. Hal ini menunjukkan bahwa daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan biaya produksi (*profitabilitas*) mengalami kenaikan dalam hal perdagangan.



Gambar 4. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Petani 2015-2019

d. Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan sektor pertanian menunjukkan kondisi tren yang fluktuatif. Pada tahun 2015, surplus neraca perdagangan mencapai US\$ 13,55 miliar, kemudian menurun menjadi US\$ 10,79 miliar pada tahun 2016, dan meningkat kembali menjadi US\$ 16,33 miliar pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018, terjadi penurunan neraca perdagangan sektor pertanian menjadi US\$ 10,19 miliar seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Hal tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2019 dimana neraca perdagangan hanya surplus US\$ 8,59 miliar. Secara umum, subsektor perkebunan menjadi kontributor utama surplus neraca perdagangan.

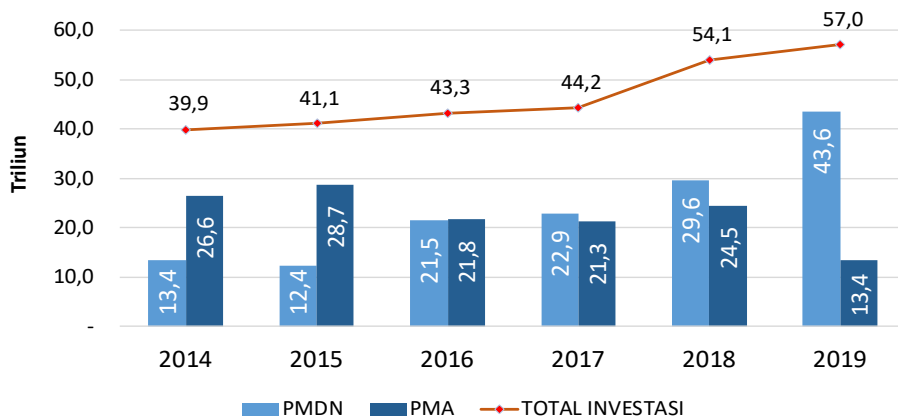


Gambar 5. Neraca Perdagangan Pertanian 2015-2019

e. Investasi

Selama periode 2015-2019, terjadi peningkatan investasi yang cukup signifikan di sektor pertanian yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini terlihat dari jumlah investasi PMDN yang pada tahun 2015 sebesar Rp 12,4 triliun, meningkat menjadi Rp. 29,6 triliun pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi Rp. 43,6 triliun di tahun 2019.

Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian, nilai investasi pada tahun 2015 mencapai Rp 28,7 triliun, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 13,4 triliun. Realisasi investasi sektor pertanian baik PMDN maupun PMA, lebih terfokus pada Subsektor Perkebunan, dibandingkan dengan Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Pada periode 2015–2019, realisasi investasi PMDN dan PMA pada Subsektor Perkebunan kontribusinya mencapai 95,51%, sedangkan Subsektor Tanaman Pangan 0,26%, Hortikultura 0,16% dan Ternak 4,02%.



Gambar 6. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Sektor Pertanian Sempit 2014-2019

1.2. Produksi Komoditas Strategis Pertanian

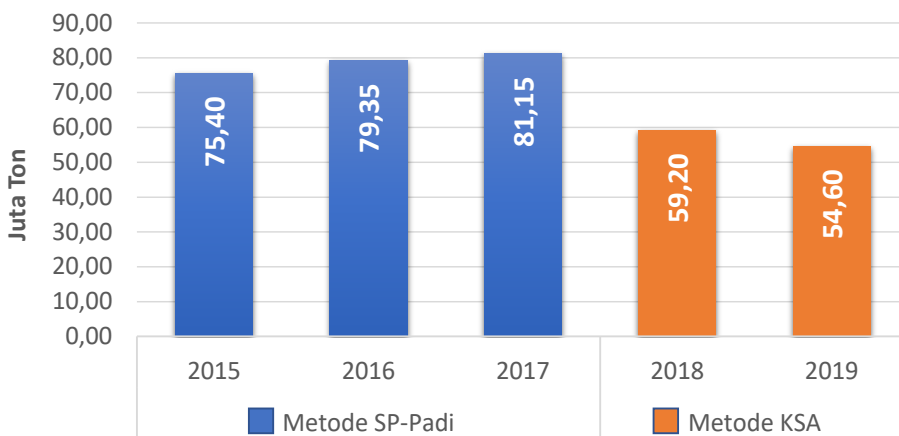
Komoditas strategis pertanian merupakan komoditas-komoditas pertanian yang bernilai ekonomi cukup tinggi untuk menjaga ketahanan pangan (stabilitas harga) agar tidak terjadi inflasi. Komoditas-komoditas strategis tersebut di antaranya komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang, tebu dan daging sapi/kerbau.

a. Padi



Pada tahun 2015 produksi padi sebesar 75,4 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), kemudian meningkat menjadi 81,15 juta ton GKG pada tahun 2017. Pada tahun 2018, BPS merilis data produksi padi dengan menggunakan metode baru, yaitu metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang merupakan teknik

pendekatan pengambilan sampel yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi sistem informasi geografi (SIG), penginderaan jauh, teknologi informasi dan statistika untuk perolehan data dan informasi pertanian tanaman pangan untuk memperbaiki metodologi perhitungan data padi yang selama ini digunakan. Penggunaan basis KSA dalam menentukan sampel ubinan adalah untuk mengurangi risiko lewat panen sehingga perhitungan menjadi lebih akurat. Hasil perhitungan metode KSA menunjukkan bahwa produksi padi tahun 2018 sebesar 59,20 juta GKG atau terdapat perbedaan sebesar 23,84 juta ton GKG dengan data yang dihasilkan metode survei pertanian (SP)-Padi. Adanya perbedaan hasil perhitungan disebabkan karena adanya perbedaan metode yang digunakan antara metode KSA dengan metode SP-Padi yang selama ini dilakukan oleh BPS.



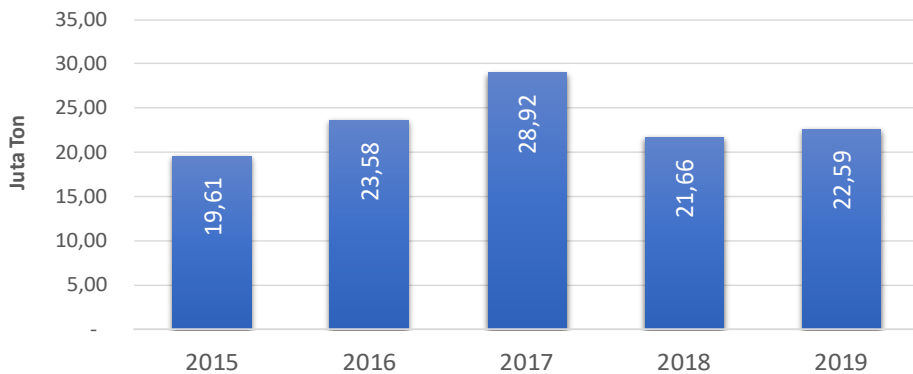
Gambar 7. Produksi Padi Menggunakan Metode SP-Padi (2015-2017) dan KSA (2018-2019).

b. Jagung

Pada tahun 2017 produksi jagung mencapai angka 28,92 juta ton pipilan kering atau naik 47,48% jika dibandingkan produksi tahun 2015, yang hanya sebesar 19,61 juta ton pipilan kering. Peningkatan produksi yang sangat signifikan tersebut merupakan hasil dari program Upaya Khusus (UPSUS) melalui pengembangan



jagung 3 juta hektar, integrasi sawit/kebun dan perhutani dengan jagung, kemitraan dengan Gabungan Perusahaan Pakan Ternak (GPMT) dengan petani jagung dan kebijakan harga bawah di tingkat petani. Diperkirakan lebih dari 60% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 24%, sisanya untuk kebutuhan industri lainnya dan benih (14%). Perkembangan produksi jagung pada periode 2015-2019 menunjukkan adanya pertumbuhan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2018.



Gambar 8. Produksi Jagung 2015-2019

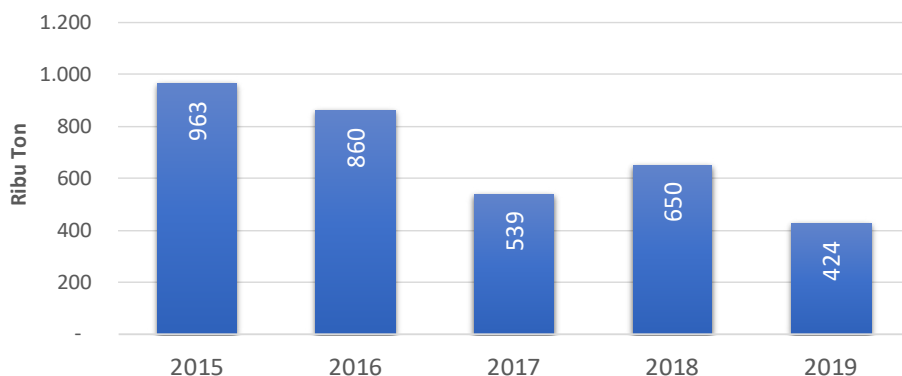
c. Kedelai

Produksi kedelai pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016-2017, produksi kedelai





mengalami peningkatan pada tahun 2018. Realisasi produksi tahun 2018 sebesar 0,65 juta ton, mengalami peningkatan sebesar 20,37% dibanding tahun 2017 yang hanya sebesar 0,54 juta ton. Produksi kedelai tahun 2019 mencapai 0,42 juta ton, atau mengalami penurunan sebesar 34,74% dari produksi tahun 2018. Rendahnya produksi kedelai disebabkan antara lain oleh jumlah benih unggul yang didistribusikan ke lapangan tidak memadai dan petani belum bersemangat mengembangkan komoditas kedelai, karena harga jualnya belum memberikan keuntungan yang layak.



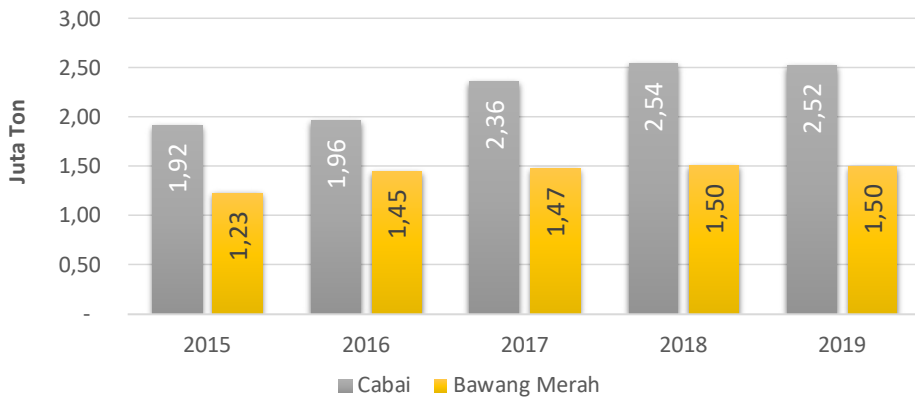
Gambar 9. Produksi Kedelai 2015-2019

d. Komoditas Hortikultura (Cabai dan Bawang Merah)



Komoditas hortikultura yang mempengaruhi inflasi dan ekonomi nasional adalah cabai dan bawang. Kementerian Pertanian pada tahun 2015-2018 telah melakukan terobosan kebijakan dalam upaya peningkatan produksi cabai dan bawang merah melalui: (1) memperbaiki aspek kebijakan;

(2) pengembangan infrastruktur; (3) pembenahan aspek kegiatan *on-farm* dan pascapanen; dan (4) penanganan pasar cabai dan bawang merah. Dari tahun 2015 sampai dengan 2019, produksi cabai cenderung meningkat setiap tahun, dengan peningkatan rata-rata sebesar 5,87%/tahun. Produksi cabai pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,52 juta ton atau 31,52% lebih tinggi dibanding tahun 2015 (1,92 juta ton).



Gambar 10. Produksi Cabai dan Bawang Merah 2015-2019

Keberhasilan produksi cabai ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan melalui pengaturan pola tanam, menekan biaya produksi dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) ramah lingkungan, penerapan irigasi hemat air, penggunaan mulsa, dan pemberdayaan petani unggulan (*champion*).

Produksi bawang merah pada tahun 2019 mencapai 1,5 juta ton atau naik 21,95% jika dibandingkan produksi tahun 2015 sebesar 1,23 juta ton. Dari tahun 2015 sampai dengan 2019, produksi cabai cenderung meningkat setiap tahun, dengan peningkatan rata-rata sebesar 5,33% (Gambar 10).

e. Tebu

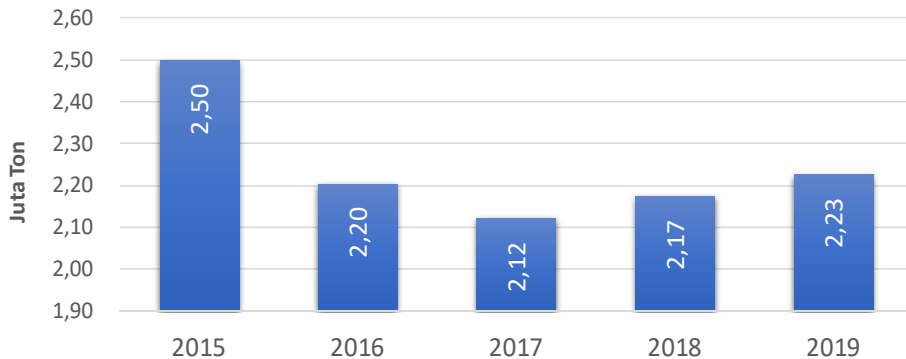
Pada periode 2015-2019, produksi tebu mengalami penurunan pada tahun 2016-2017 kemudian mulai meningkat kembali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Produksi tebu pada tahun 2015 sebesar 2,50 juta ton, sedangkan pada tahun 2017 produksinya sebesar 2,12 juta ton. Produksi tebu pada tahun 2019



sebesar 2,23 juta ton, meningkat 2,77% jika dibandingkan produksi tahun 2018, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan gula tebu dalam negeri. Faktor yang menyebabkan masih belum optimalnya produksi gula tebu, yaitu:



perubahan iklim atau anomali iklim, inovasi teknologi budidaya terbaru belum optimal, terbatasnya varietas unggul baru yang adaptif di lahan kering, dukungan pengolahan belum optimal, petani meragukan transparansi rendemen, dukungan kebijakan dan regulasi belum tepat, distabilitas harga, minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan, sumber daya alam (SDA) terbatas untuk tebu dan minimnya investasi terhadap industri gula berbasis tebu.



Gambar 11. Produksi Tebu 2015-2019

f. Sapi/Kerbau



Produksi daging sapi dan kerbau pada periode 2015-2019 cukup fluktuatif. Pada tahun 2015, produksi mencapai 542,07 ribu ton, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 550,39 ribu ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 515,70 ribu ton. Pada tahun 2018, produksi daging

sapi dan kerbau kembali meningkat menjadi 523,32 ribu ton, namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 514,40 ribu ton. Pencapaian kinerja produksi daging sapi dan kerbau sangat dipengaruhi oleh peningkatan populasi sapi dan kerbau.

Perkembangan populasi sapi dan kerbau selama 2015-2019 menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah populasi sapi dan kerbau sebanyak 17,29 juta ekor dan secara konsisten meningkat

menjadi 18,82 juta ekor pada tahun 2019 (Tabel 1). Pertumbuhan populasi mulai meningkat signifikan setelah adanya intervensi kegiatan **Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB)** dari tahun 2015-2016 yang dilanjutkan pada tahun 2017-2018 dengan adanya intervensi kegiatan **Upsus Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)**. Selain itu berbagai upaya juga dilaksanakan, seperti perbaikan bibit, pakan, peningkatan status kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan pengelolaan pemasaran.

Tabel 1. Populasi dan Produksi Daging Sapi dan Kerbau 2015-2019

JENIS		2015	2016	2017	2018	2019
Populasi (Juta Ekor)	Sapi Potong	15,42	16,00	16,43	16,43	17,12
	Sapi Perah	0,52	0,53	0,54	0,58	0,56
	Kerbau	1,35	1,36	1,32	0,89	1,14
	Total Populasi	17,29	17,89	18,29	17,91	18,82
Produksi (Ribuan Ton)	Daging Sapi	506,66	518,49	486,32	497,97	490,42
	Daging Kerbau	35,41	31,90	29,38	25,35	23,97
	Total Produksi	542,07	550,39	515,70	523,32	514,39

1.3. Ketahanan Pangan (*Global Food Security Index*)

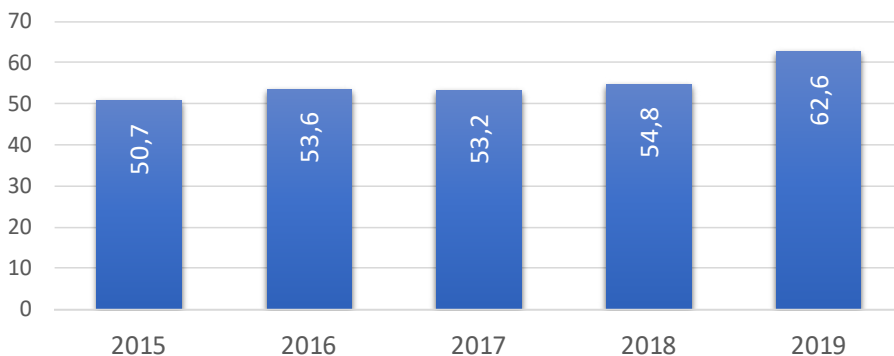
The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis *Global Food Security Index* (GFSI), yaitu instrument yang mengukur kinerja ketahanan pangan suatu negara didasarkan pada keberadaan kondisi atau faktor yang menunjang (*enabling environment*) bagi pencapaian ketahanan pangan secara agregat. GFSI diukur



dengan membandingkan situasi ketahanan pangan antarnegara berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan. Pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 62 dengan skor 62,6 (Gambar 12). Posisi ini meningkat dibandingkan posisi tahun 2015 yang berada di posisi ke-74. Meningkatnya nilai indeks ketahanan pangan Indonesia karena membaiknya posisi tiga pilar yang membentuknya, yaitu pilar keterjangkauan (*affordability*) dan ketersediaan (*availability*) serta kualitas dan keamanan (*quality and safety*). Untuk aspek keterjangkauan terhadap pangan,



posisi Indonesia naik dari 68 pada tahun 2017 menjadi 63 pada tahun 2018. Peringkat Indonesia untuk aspek kualitas dan keamanan pangan pada tahun 2018 juga meningkat dan berada pada posisi 84. Pada tahun 2019, Indonesia berada pada posisi 86. Selanjutnya, untuk aspek ketersediaan pangan, tidak hanya peringkat, tetapi skornya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 Indonesia berada di peringkat 64, naik menjadi peringkat 58 pada tahun 2018. Begitu juga untuk skor ketersediaan pangan mengalami peningkatan sebesar 11,9 poin, dari skor 50,77 pada tahun 2015 menjadi skor 62,6 pada tahun 2019.



Gambar 12. Nilai *Global Food Security Index Indonesia* 2015-2019

Ketahanan pangan nasional semakin menguat bukan hanya karena keberhasilan pembangunan di sektor pertanian namun juga didukung dari sektor lainnya. Prestasi yang diperoleh Indonesia dengan nilai skor GFSI yang semakin meningkat setiap tahunnya merupakan hasil sinergi yang terkoordinasi dengan baik melalui kelembagaan yang dapat berfungsi secara optimal untuk menggalang dan menggerakkan para pemangku kepentingan di bidang pangan. Hal ini sangat penting, karena pembangunan ketahanan pangan yang dilakukan secara komprehensif sangat kompleks dan melibatkan lintas sektor. Membangun ketahanan pangan yang mantap tidak cukup bagaimana produksi bahan pangan dapat ditingkatkan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana akses seluruh penduduk terhadap pangan bisa terpenuhi.

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembangunan pertanian berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh faktor

produksi saja, namun juga berkaitan dengan pembangunan lainnya seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan di dalam negeri serta hubungan antarnegara. Proses pembangunan yang dilaksanakan perlu memerhatikan potensi dan permasalahan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi.

2.1. Potensi Pertanian Indonesia

a. Keanekaragaman hayati

Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan potensi sumber daya pertanian yang besar, termasuk plasma nutfah yang melimpah (*mega biodiversity*). Keanekaragaman hayati (*biodiversity*) darat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Hal ini dapat dilihat dari



beragamnya jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sejak lama telah diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografis yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun.

b. Lahan Pertanian

Indonesia juga memiliki potensi lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar lahan tersebut merupakan lahan suboptimal, seperti lahan kering, rawa pasang surut, dan rawa lebak yang produktivitasnya rendah karena berbagai





kendala, seperti kekurangan dan/atau kelebihan air, tingginya kemasaman tanah dan salinitas, serta keracunan dan kahat unsur hara. Apabila lahan suboptimal dapat dimanfaatkan melalui rekayasa penerapan inovasi teknologi budi daya dan dukungan infrastruktur yang memadai, maka lahan tersebut dapat diubah menjadi lahan-lahan produktif untuk pengembangan budi daya berbagai komoditas pertanian.

Data Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (2016) menunjukkan total luas daratan Indonesia sekitar 191,1 juta ha, yang terbagi atas 43,6 juta ha lahan basah dan 144,5 juta ha lahan kering. Dari total luasan tersebut, 15,9 juta ha di antaranya berpotensi untuk areal pertanian, yang terdiri atas 3,4 juta ha lahan APL (Areal Penggunaan Lain), 3,7 juta ha lahan HP (Hutan Produksi), dan 8,9 juta ha lahan HPK (Hutan Produksi dapat Dikonversi). Potensi ketersediaan sumber daya lahan untuk pengembangan padi sawah seluas 7,5 juta ha, tanaman pangan, cabai, bawang merah dan tebu 7,3 juta ha, serta tanaman cabai dan bawang merah dataran tinggi 154,1 ribu ha.

Luas dan sebaran hutan, sungai, rawa, dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun sesungguhnya juga merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Waduk, bendungan, embung, air tanah dan air permukaan potensial mendukung pengembangan usaha pertanian. Berdasarkan analisis ketersediaan air, diprediksikan bahwa kebutuhan air sampai tahun 2020 untuk Indonesia masih dapat dipenuhi dari air yang tersedia saat ini. Proyeksi permintaan air untuk tahun 2020 sebesar 18% dari total air tersedia, yang digunakan sebagian besar untuk keperluan irigasi (66%), sisanya 17% untuk rumah tangga, 7% untuk perkotaan dan 9 % untuk industri. Sedangkan berdasarkan analisis yang sama untuk satuan pulau, pada tahun 2020 Pulau Bali dan Nusa Tenggara akan membutuhkan sebanyak 75% dari air yang tersedia saat ini di wilayahnya, disusul Pulau Jawa sebesar 72%, Sulawesi 42%, Sumatera 34%, adapun Kalimantan dan Maluku-Papua masing-masing membutuhkan 2,3% dan 1,8% dari total air tersedia saat ini.

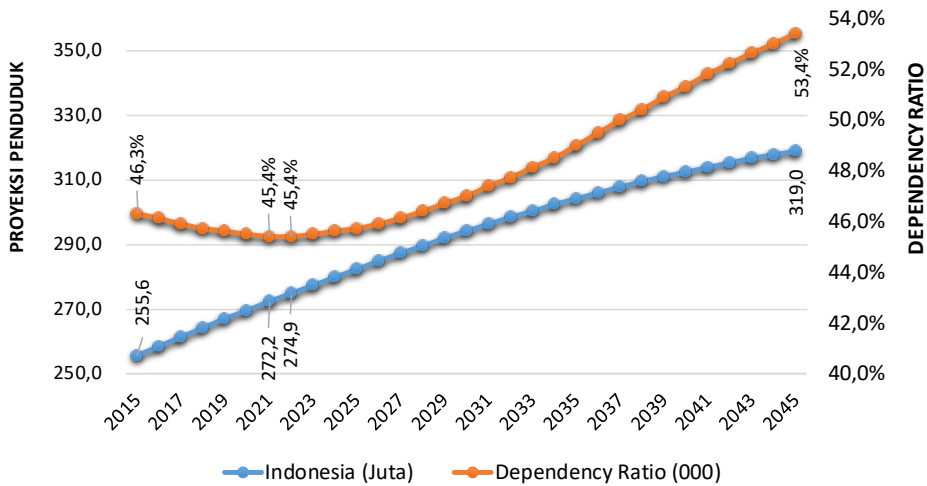
c. **Penduduk (Bonus Demografi)**

Potensi lainnya adalah penduduk yang sebagian besar bermukim di perdesaan dan memiliki budaya kerja keras, juga merupakan potensi tenaga kerja yang mendukung pengembangan pertanian. Berdasarkan data Sakernas (2018), lebih dari 35,7 juta tenaga kerja masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Apabila pengetahuan dan keterampilan penduduk di suatu wilayah dapat ditingkatkan agar mampu bekerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas bagi pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan global.



Berdasarkan Sensus 2010, pada tahun 2010-2040 akan terjadi ledakan penduduk berusia muda di Indonesia atau bonus demografi. Pada periode bonus demografi tersebut, Indonesia memiliki peluang atau kesempatan besar (*window of opportunity*) untuk memanfaatkan penduduk usia muda secara produktif. Kondisi ini bisa menjadi peluang yang baik dalam memacu pertumbuhan di segala bidang melalui ketersediaan tenaga muda yang terampil. Namun apabila peluang ini tidak dimanfaatkan secara baik, kondisi ini bisa menjadi bumerang yang justru menghambat pertumbuhan di segala bidang, terutama di bidang pertanian.





Gambar 13. Proyeksi *Dependency Ratio* dan Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2015-2045

d. Inovasi dan Teknologi



Sumber daya pertanian yang ada perlu dimanfaatkan secara optimal dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya telah menghasilkan berbagai paket teknologi tepat guna yang dapat

dimanfaatkan untuk menggali potensi sumber daya pertanian dalam upaya peningkatan produktivitas, kualitas, dan kapasitas produksi. Berbagai varietas serta klon tanaman dan ternak unggul, teknologi pupuk, alat dan mesin pertanian, bioteknologi, nanoteknologi, aneka teknologi budi daya, pascapanen, dan pengolahan hasil pertanian telah tersedia. Meskipun, aneka paket teknologi telah tersedia, namun belum semuanya dapat diadopsi petani karena berbagai kendala, seperti terbatasnya permodalan, lemahnya kelembagaan, skala usaha yang relatif kecil, terbatasnya keterampilan, dan belum meratanya kegiatan diseminasi teknologi di tingkat petani.

2.2 Permasalahan

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Permasalahan di sektor pertanian dan pangan bisa di kategorikan sebagai berikut :

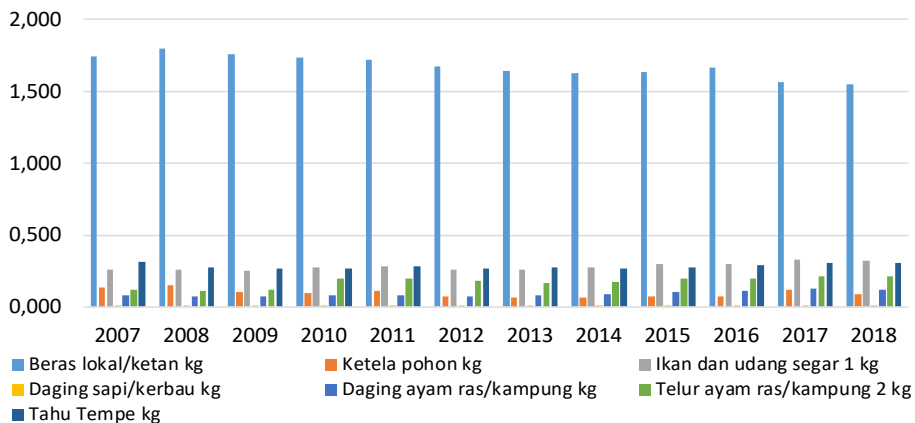
a. Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi

Berdasarkan data dan proyeksi pertumbuhan Penduduk 2015-2045, diperkirakan pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318,96 juta atau tumbuh 24.80% (63,37 Juta Jiwa) dari 2015. Sektor pertanian dituntut memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh penduduk Indonesia sepanjang waktu sebagai syarat dasar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja nasional.



Selanjutnya, terkait konsumsi per kapita, terdapat 5 (lima) bahan makanan penting nasional yang konsumsinya berpotensi terus meningkat yaitu: beras, ikan, udang segar, tahu-tempe, telur ayam ras/kampung, dan daging ayam ras/kampung (Gambar 14). Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan swasembada padi (data KSA sudah melebihi konsumsi nasional), dan meningkatkan produksi jagung pakan (untuk pemenuhan budidaya ayam ras/kampung untuk telur dan dagingnya) serta kedelai (bahan baku tahu tempe).





Gambar 14. Rata-rata Konsumsi per kapita Beberapa Macam Bahan Pangan Penting di Indonesia 2007-2018 (Sumber: BPS Tahun 2018)

Dalam rangka ketersediaan dan akses pangan penduduk berdasarkan kelompok pengeluaran, perlu diketahui bahwa: (1) Ketersediaan kalori pangan penduduk dalam rentang waktu 2013-2017 selalu lebih tinggi dari angka kecukupan dan konsumsinya, dan rata-rata tingkat konsumsinya masih di bawah angka kecukupannya; (2) Ketersediaan protein penduduk dalam rentang waktu 2013-2017 selalu lebih tinggi dari angka kecukupan dan konsumsinya; (3) dalam kurun waktu 2013-2015 rata-rata tingkat konsumsinya masih di bawah angka kecukupannya; dan (4) setelah itu (kurun waktu 2015-2017) rata-rata tingkat konsumsinya telah di atas angka kecukupannya. Dengan demikian, ketersediaan kalori dan protein secara nasional mengalami surplus, namun demikian jika konsumsi pangan dilihat dari kelompok pengeluaran penduduk, konsumsi pada kelompok kuintil 1 sampai 2 masih di bawah standar kecukupan gizi nasional. Hal ini, disebabkan permasalahan akses penduduk berpenghasilan rendah terhadap pangan karena kemiskinan walaupun secara nasional ketersediaan kalori dan protein dalam kondisi surplus.

Tabel 2. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia berdasarkan Wilayah dan Kuintil Pengeluaran 2019

Wilayah	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5	Standar Nasional
Perkotaan						
Kalori (kkal/orang/hari)	1.728,7	1.984,4	2.145,0	2.312,6	2.534,2	2.100,0
Protein (gram/hari)	47,5	56,7	63,5	71,4	83,7	57,0

Wilayah	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5	Standar Nasional
Perdesaan						
Kalori (kkal/orang/hari)	1.678,9	1.957,7	2.140,2	2.346,0	2.649,4	2.100,0
Protein (gram/hari)	43,4	52,1	58,1	65,3	77,6	57,0

Permasalahan pada aspek gizi, isu *stunting*, gizi buruk dan kekurangan gizi pada wanita usia produktif merupakan hal yang mengemuka. Indonesia termasuk dalam 26 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi (*Global Nutrition Report, 2018*). Saat ini sebanyak 150,8 juta anak mengalami *stunting* di seluruh dunia, dan di antaranya 7,3 juta merupakan anak yang berada di Indonesia. *Stunting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, berakibat hilangnya 11% PDB serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, *stunting* juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan menyebabkan kemiskinan antar generasi. *World Food Programme* (WFP) dalam studi tentang biaya pangan Indonesia 2017, menyatakan bahwa secara nasional hanya 62% rumah tangga Indonesia yang dapat membeli pangan bergizi dikarenakan hambatan daya beli rumah tangga miskin, dan program subsidi pemerintah untuk masyarakat miskin belum memenuhi standar kecukupan gizi.

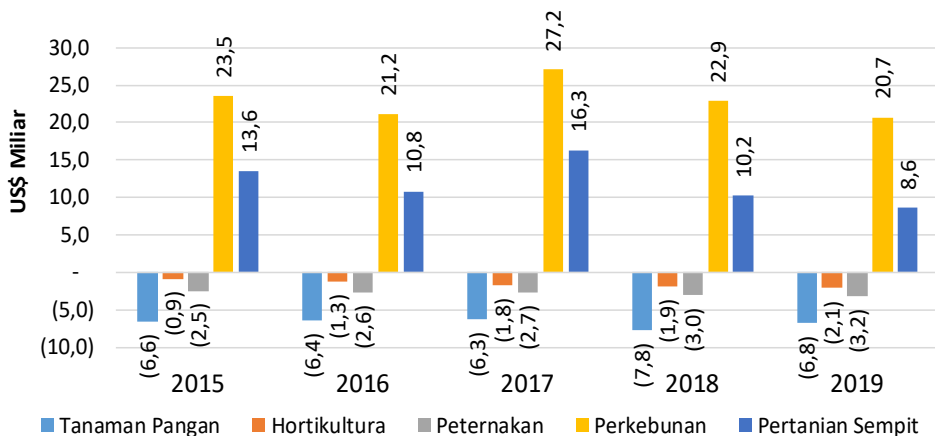
b. Defisit Perdagangan Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Karakteristik usaha pertanian di Indonesia adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor sebagai instrumen *non tariff*



barrier yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk-produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor. Kondisi tersebut akan semakin diperparah apabila terjadi pelemahan daya beli konsumen pada

saat terjadinya krisis ekonomi dalam skala global.



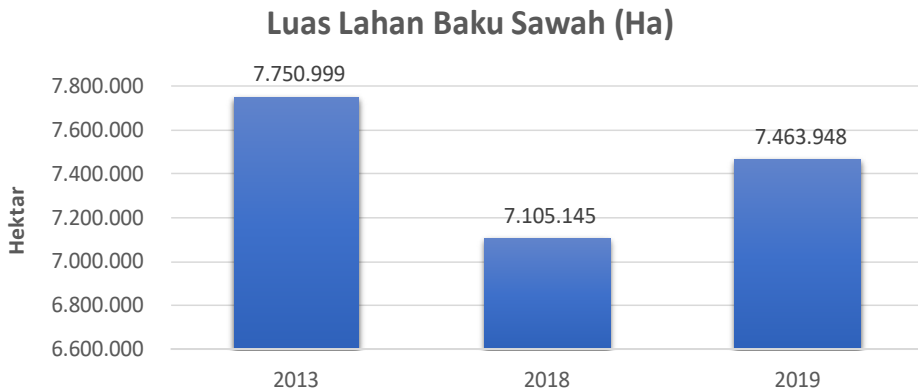
Gambar 15. Defisit Neraca Perdagangan Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Neraca perdagangan pertanian Indonesia periode 2015-2019 menunjukkan nilai surplus rata-rata US\$ 11,9 miliar/tahun. Subsektor perkebunan merupakan penyumbang ekspor dan surplus terbesar di sektor pertanian. Sementara perdagangan subsektor pertanian Indonesia lainnya masih dalam posisi defisit. Ke depan perlu diupayakan bagaimana meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah (kawasan), baik dalam skala nasional (antardaerah) maupun kerja sama regional (antarnegara).

c. Status dan Luas Kepemilikan Lahan

Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan yang tidak hanya menyebabkan produksi pangan turun, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui

perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

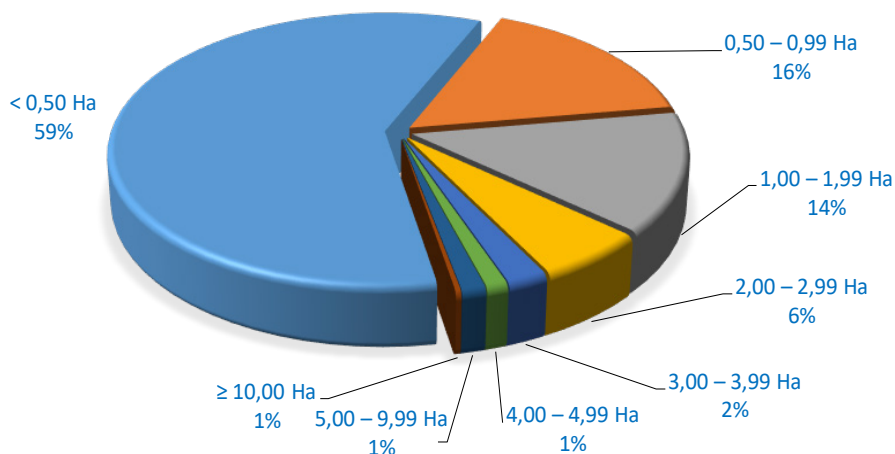


Gambar 16. Luas Lahan Baku Sawah

Luas lahan menjadi salah satu faktor penentu tercapainya target produksi. Khusus untuk lahan padi sawah, penetapan luas baku lahan sawah dilakukan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN. Penghitungan luas lahan baku sawah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dengan menggunakan metode survei KSA yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan BPS, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Badan Informasi dan Geospasial (BIG); serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Kementerian Pertanian. Sejak tahun 2017, perhitungan luas lahan baku sawah dilakukan melalui dua tahapan yaitu menggunakan citra satelit resolusi sangat tinggi dan melalui validasi ulang di lapangan. Pada tahun 2018, dua tahapan tersebut dilakukan di 16 provinsi sentra produksi padi yang mencakup 87 persen dari total luas lahan baku sawah di Indonesia. Luas lahan baku sawah nasional menurut Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 399/KEP-23.3/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018, tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018 seluas 7.105.145 Hektar atau

berkurang 645.854 Hektar dari luas lahan 2013. Pada 2019, Kementerian ATR/BPN kembali menetapkan luas lahan baku sawah nasional 2019 berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019 yaitu sebesar 7.463.948 hektar.

Luas Lahan Pertanian Yang dikuasai Rumah Tangga Usaha Pertanian (2018)



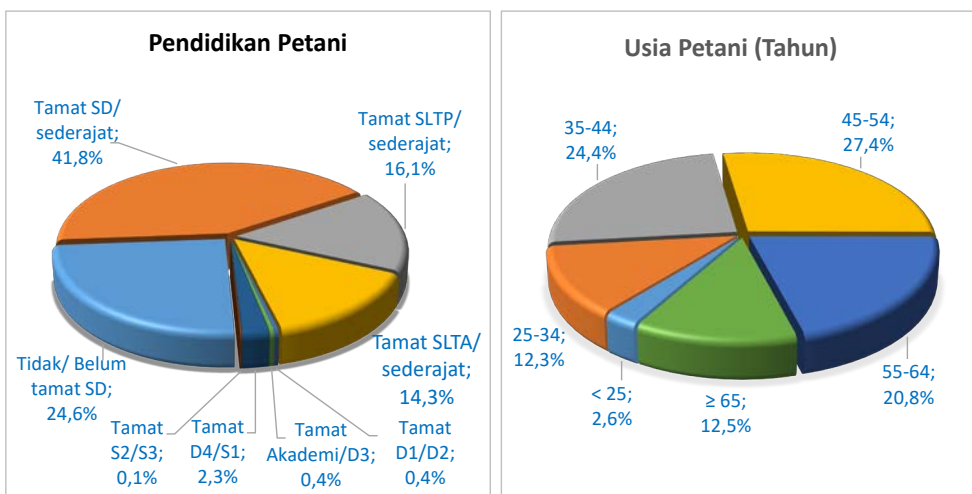
Gambar 17. Luas Lahan Pertanian Yang dikuasai Rumah Tangga Usaha Pertanian

Selain masalah luas lahan yang menurun, masalah lain yang terkait dengan lahan yaitu kepemilikan lahan oleh petani yang semakin sempit. Berdasarkan Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) tahun 2018, luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian kurang dari 0,5 hektar sebanyak 15,89 juta rumah tangga atau 59,07% dari total rumah tangga petani. Rumah tangga petani yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 14,62 juta rumah tangga pada tahun 2013 menjadi 15,89 juta rumah tangga pada tahun 2018. Kondisi kepemilikan lahan ini disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum; (2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan; dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah.

d. Pendidikan dan Usia Petani

Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil SUTAS BPS tahun 2018, sebanyak 27,4% tenaga kerja di sektor pertanian merupakan tenaga kerja yang berusia antara 45-54 tahun, kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 24,4% dan disusul tenaga kerja kelompok usia 55-64 sebanyak 20,8%. Dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda di sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian.

Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, disusul oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (*vocational training*), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru.



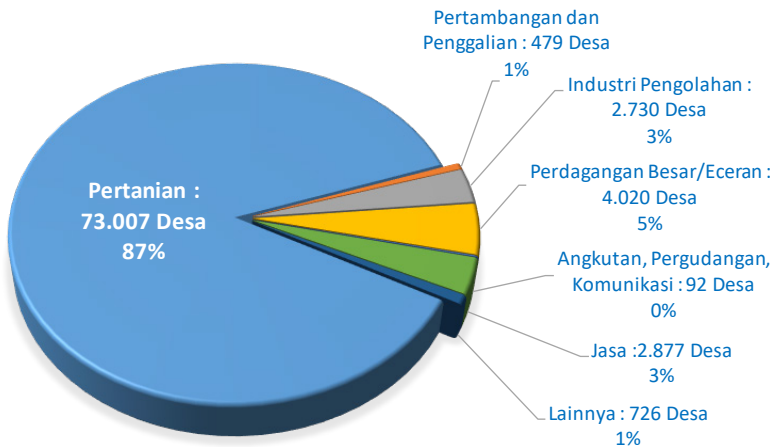
Gambar 18. Pendidikan dan Umur Petani Tahun 2018 (Sumber: BPS, 2019).



e. Kemiskinan Perdesaan

Pembangunan pertanian selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan penghasil devisa nasional melalui ekspor, juga sebagai faktor utama pertumbuhan wilayah perdesaan. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di perdesaan. Berdasarkan data BPS (2018), penghasilan utama penduduk Indonesia di 73 ribu desa (87%) berasal dari sektor pertanian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian dan perdesaan.

Penghasilan Utama Penduduk Perdesaan

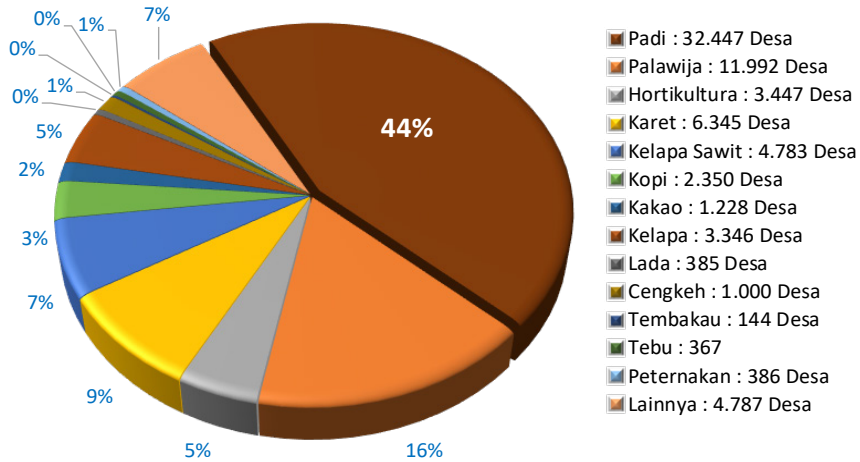


Gambar 19. Penghasilan Utama Penduduk Perdesaan (Sumber: BPS, 2018)

Subsektor padi dan palawija berkontribusi terhadap 60% penghasilan penduduk desa, yang diikuti oleh perkebunan karet dan kelapa sawit sebesar 16%, hortikultura 5%, kelapa 5%, kopi 3%, kakao 2% dan lainnya 9%. Peternakan sebagai sumber protein nasional hanya berkembang di 1% wilayah pertanian perdesaan (Gambar 20).



Sebaran Penghasilan Di Sektor Pertanian Berdasarkan Komoditas



Gambar 20. Sebaran Penghasilan di Sektor Pertanian Berdasarkan Komoditas
(Sumber: BPS, 2018)

Kepemilikan lahan/ternak, teknologi, kompetensi, inovasi, produktivitas, efisiensi, serta kepastian harga dan pasar akan sangat berpengaruh terhadap kemiskinan perdesaan. Laju penurunan kemiskinan perdesaan adalah sebesar 1,08% per tahun, lebih rendah jika dibandingkan perkotaan. Secara nasional jumlah penduduk miskin menunjukkan tren yang menurun (3,32%/tahun) selama periode 2015-2019.

Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan menunjukkan bahwa penduduk desa yang sebagian besar bekerja sebagai petani belum menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Arus uang yang mengalir ke desa baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber pembiayaan lainnya belum sepenuhnya dinikmati penduduk miskin di perdesaan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, anggaran untuk kedaulatan pangan cukup tinggi mencapai Rp 96,2 triliun pada tahun 2019.



Tabel 3. Total Anggaran Kedaulatan Pangan di Indonesia 2015-2020 (Rp. Triliun)

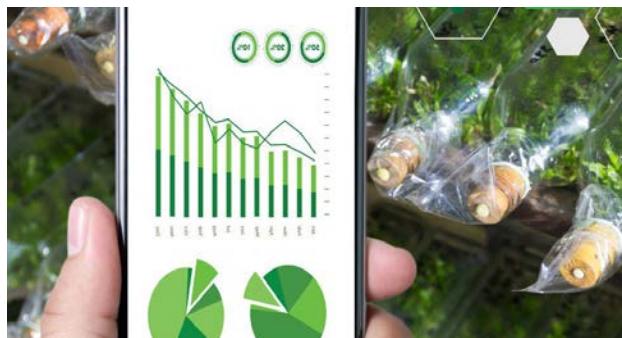
URAIAN		2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Kementerian Negara/ Lembaga	44,1	31,2	36,6	57,2	56,8	66,8
	1. 018 Kementerian Pertanian	28,7	21,1	21,9	21,8	21,7	21,1
	2. 032 Kementerian KKP	6,7	4,6	4,2	6,1	2,8	6,4
	3. 033 Kementerian PU dan PERA	8,6	5,5	8,9	10,4	11,5	11,3
	4. 027 Kementerian Sosial	-	-	1,6	18,9	20,8	28,1
II	Non K/L	66,1	68,2	56,7	42,2	39,4	35,5
	1. Subsidi	53,3	49,4	49,1	33,6	29,5	26,6
	a. Subsidi Pangan	21,8	22,1	19,5	-	-	-
	b. Subsidi Pupuk	31,3	26,9	28,8	33,6	29,5	26,6
	c. Subsidi Benih	0,1	0,4	0,8	-	-	-
	d. Subsidi bunga kredit resi gudang	0	0	0	-	-	-
	2. Belanja Lain-lain	1,5	3,4	2,5	3,2	5	5,4
	a. Cadangan Beras Pemerintah	1,5	2	2,5	2,5	2,5	2,8
	b. Cadangan Stabilisasi Harga Pangan dan Ketahanan Pangan	-	1,4	-	0,7	2,5	2,6
	c. Cadangan Benih Nasional	-	-	-	-	-	-
	d. Cadangan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-
	3. Transfer ke Daerah (DAK)	11,4	15,5	5,1	5,3	4,9	3,6
	a. DAK Irigasi	-	12	3,6	3,8	3	2,1
	b. DAK Pertanian	-	3,4	1,5	1,6	1,9	1,5
Total		110,2	99,4	93,3	99,4	96,2	102,4

Sumber: <http://data-apbn.kemenkeu.go.id>

Apabila ditinjau dari besaran dan komposisi anggaran kedaulatan pangan, maka tantangan untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah bagaimana penggunaan dana kedaulatan pangan ini yang tersebar di semua instansi mampu mengintervensi pembangunan perdesaan sehingga mampu menggerakkan perekonomian di desa yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan mayoritas penduduk miskin yang berprofesi sebagai petani.

f. Dampak Disrupsi Revolusi Industri 4.0

Perubahan dunia yang begitu cepat dengan berkembangnya inovasi dan teknologi mendorong revolusi baru yang disebut revolusi industri 4.0. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomatis yang terintegrasi dengan jaringan internet. Semua itu mengubah cara manusia berinteraksi hingga pada



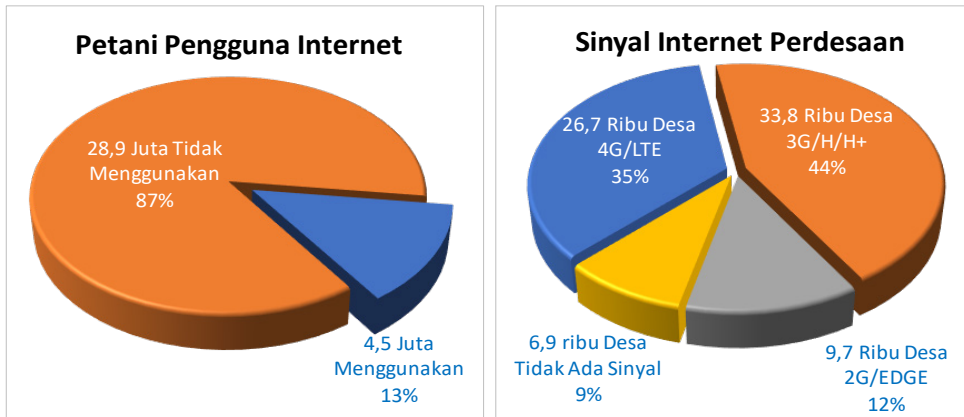
level yang paling mendasar, sekaligus dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri termasuk industri pertanian. Di era digitalisasi pada revolusi industri 4.0, para pemangku kepentingan di sektor pertanian harus mampu mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Salah satu kunci dari perubahan ini adalah penggunaan internet oleh petani. BPS (2018) menyatakan bahwa potensi internet di tingkat petani dan perdesaan sebesar 93,9%. Sebagian besar pengguna internet melakukan akses internet melalui *Smartphone*/telepon seluler (96,6%). Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) tahun 2018, terdapat 77.172 (91,95%) desa/kelurahan yang telah dapat menerima sinyal telepon selular. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2011 dan 2014, di mana desa/kelurahan yang dapat menerima sinyal telepon selular hanya sebanyak 70.610 (89,82%) desa/kelurahan pada tahun 2011 dan 74.473 (90,61%) desa/kelurahan pada tahun 2014.

Dari total petani Indonesia (33,4 juta petani), terdapat 4,5 juta petani menggunakan internet (13%). Secara umum, sinyal internet telah merata pada sebagian besar perdesaan dan telah terjangkau sinyal 2G, 3G dan 4G. Berdasarkan data tersebut, era industri 4.0 yang salah satunya menggunakan



keterhubungan semua perangkat dengan internet dapat dijadikan modal awal transformasi digital di pertanian.



Gambar 21. Petani Pengguna Internet dan Sinyal Internet Perdesaan Tahun 2018 (Sumber: BPS, 2018)

g. Dampak Perubahan Iklim (DPI)

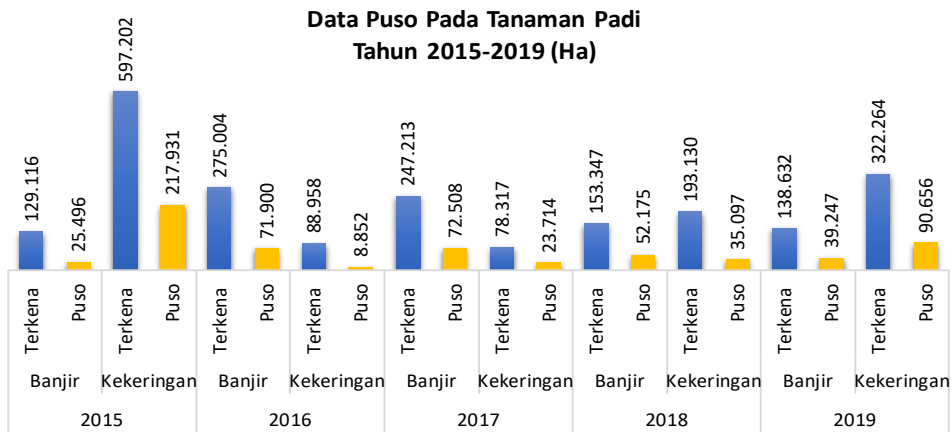


Perubahan iklim global merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petani. Perubahan iklim mengubah siklus

hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian.

Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3 persen per tahun. Dalam 5 tahun terakhir (Gambar 22) rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 188.662

Ha terkena banjir (52.265 ha di antaranya puso karena banjir) dan 255.974 Ha terkena kekeringan (75.246 ha di antaranya puso karena kekeringan).



Gambar 22. Data Puso akibat Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Padi 2015-2019

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Di samping itu, perlu menciptakan teknologi tepat guna dan menciptakan varietas yang memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran kenaikan suhu, kekeringan, banjir atau genangan dan salinitas.

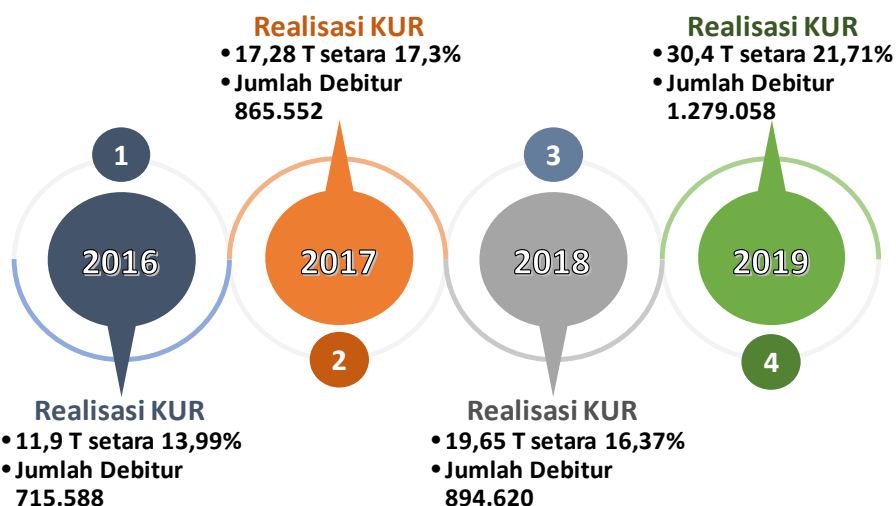
h. Keterbatasan akses pembiayaan bagi petani

Pembiayaan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Namun demikian aksesibilitas petani terhadap pembiayaan merupakan masalah utama yang sering



dikeluhkan oleh petani. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani. Di sisi lain lembaga pembiayaan masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko (*high risk*), tergantung musim dan jaminan harga yang tidak pasti.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 menyatakan hanya sekitar 15 persen dari sekitar 8.000 sampel petani yang sudah mengakses kredit bank, sedangkan mayoritas sebesar 52 persen masih mengandalkan modal sendiri, koperasi, kerabat, dan lembaga keuangan non-Bank lainnya. Sementara itu, 33 persen petani lainnya mengandalkan kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan kredit usaha rakyat (KUR). Meskipun skema pembiayaan usaha pertanian telah tersedia tetapi kondisi masyarakat petani masih dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk menambah permodalan melalui lembaga pembiayaan dan investasi. Pemerintah telah memberi berbagai fasilitas pembiayaan untuk memudahkan petani untuk mengakses permodalan untuk usaha taninya. Namun dalam implementasinya petani masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya realisasi penyaluran KUR untuk sektor pertanian (Gambar 23).



Gambar 23. Realisasi KUR Sektor Pertanian 2016-2019

Ketidakmampuan petani untuk mengakses sumber pemodalan formal diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan. Tantangan ke depan dari kondisi ini adalah bagaimana berkolaborasi dengan lembaga pembiayaan agar berpihak dan mau menyalurkan modalnya ke sektor pertanian.



BAB

2

**VISI, MISI
DAN TUJUAN**





1. VISI

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah :

**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong**

Indikator kemajuan Indonesia adalah negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Visi bagi Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yaitu sebuah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu :

1. Pembangunan SDM

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke

kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :

***“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern
untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.



2. MISI

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian **mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing** melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya *outcome* program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

3 TUJUAN

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan indikator :

- a. *Global Food Security Index* (GFSI) dengan target skor 62,6 (Th. 2020) dan 69,8 (Th. 2024),
- b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90,4 (Th. 2020) dan 95,2 (Th. 2024),
- c. Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 Kkal/kapita/hari hingga tahun 2024,
- d. Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kapita/hari hingga tahun 2024,
- e. *Prevalence of Under-nourishment/PoU* (Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2% (Th. 2020) dan 5,0 % (Th. 2024),
- f. *Food Insecurity Experience Scale/FIES* (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 (Th. 2020) dan nilai 4,0 (Th. 2024),
- g. Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020 dan 46,8 juta ton (th. 2024),
- h. Ketersediaan protein hewani dengan target 2,50 juta ton (Th. 2020) dan 2,90 juta ton (Th. 2024),
- i. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20% penerima BPNT (Th. 2020) dan 100% (Th. 2024),
- j. Persentase pangan organik dengan target 5% (Th. 2020) dan 20% (Th. 2024).



2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan indikator :

- a. Nilai tambah per tenaga kerja dengan target Rp. 49,3 juta/tenaga kerja (Th. 2020) dan Rp. 59,8 juta/tenaga kerja (Th. 2024),
- b. Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36% (Th. 2020) dan 3,76% (Th. 2024),
- c. Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9% (Th. 2020) dan 5,0% (Th. 2024),
- d. Pertumbuhan PDB Hortikultura dengan target 5,8% (Th. 2020) dan 5,9% (Th. 2024),
- e. NTP dengan target 103 (Th. 2020) dan 105 (Th. 2024).

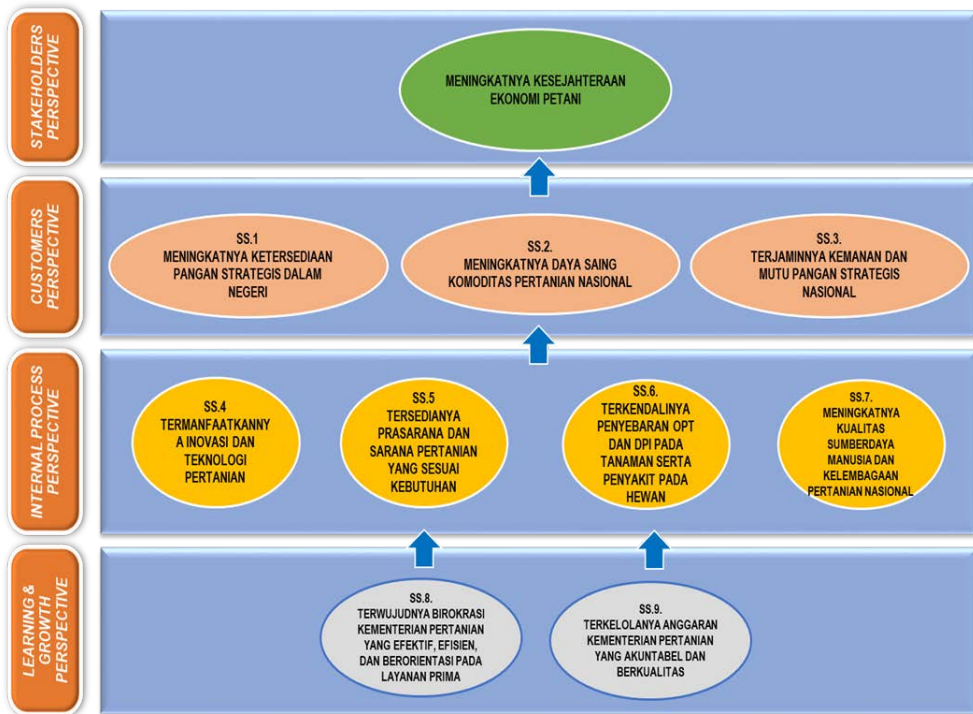
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, dengan indikator :

- a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan target skor 79,96 (Th. 2020) dan 82,96 (Th. 2024),
- b. Opini BPK RI dengan target WTP hingga tahun 2024.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memerhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*.





Gambar 24. Peta Strategi Kementerian Pertanian 2020-2024

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

SS1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja :

1. peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri

SS2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja :

2. pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional
3. persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan

SS3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja :

4. persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional
5. persentase kasus pelanggaran perkarantina yang diselesaikan



SS4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja :

6. persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
7. teknologi yang diterapkan oleh pertanian

SS5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja :

8. indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan
9. indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan

SS6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja :

10. persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani
11. persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
12. persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)

SS7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja :

13. persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya
14. persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian

SS8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja :

15. nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

SS9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja :

16. nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja sasaran strategis di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian dengan targetnya dijelaskan dalam Target Kinerja (Bab IV) Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024. Indikator Strategis sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian diturunkan menjadi Sasaran dan Indikator Kegiatan (secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra).



BAB

3

**ARAH KEBIJAKAN,
STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN
KERANGKA
KELEMBAGAAN**





1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan SDA, SDM yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

RPJMN Tahun 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005-2025, terutama pendapatan perkapita Indonesia yang ditargetkan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country/MIC*). Pembangunan nasional digambarkan sebagai pembangunan bangsa yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik..

1.1. Agenda Pembangunan

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan agenda sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Terdapat 4 (empat) faktor sebagai penggerak dalam pembangunan

ekonomi, yaitu: (1) pengelolaan SDA secara optimal; (2) SDM berkualitas; (3) teknologi maju dan (4) konsolidasi kelembagaan pertanian. Adapun untuk kebijakan pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah yang didukung oleh pertanian di antaranya :

1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT).
2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
4. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi.
5. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.
6. Peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Strategi yang dilakukan dalam mendukung kebijakan tersebut di antaranya:

1. Produksi bahan bakar nabati berbasis sawit dipenuhi melalui pemberdayaan perkebunan sawit rakyat.
2. Penggunaan air secara efisien terutama di sektor pertanian.
3. Peningkatan kinerja budidaya komoditas pertanian, pengembangan benih padi biofortifikasi dan produk rekayasa genetik, fortifikasi produk beras, pengembangan nanoteknologi produk pangan, pengembangan produk pangan lokal dan diversifikasi bahan pangan di tingkat masyarakat, serta penyediaan dan perbaikan kualitas pangan untuk anak sekolah.
4. Peningkatan kemitraan usaha (*business partnership*), kapasitas dan akses pembiayaan bagi wirausaha pertanian serta pelatihan wirausaha generasi muda.
5. Peningkatan produktivitas, penguatan rantai pasok, penggunaan mekanisasi, pengembangan produk (*product development*) dan promosi produk (*promotion product*), serta perluasan produk industri pertanian.
6. Penguatan *platform* informasi ekspor dan impor mencakup informasi pasar, regulasi dan prosedur, insentif dan advokasi termasuk tentang kerja sama bilateral dan multilateral.



b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan ekonomi wilayah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan wilayah dilakukan melalui pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang disertai pemerataan (*growth with equity*).

Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu menurunkan kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera, serta peningkatan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah salah satunya dengan pembangunan kawasan strategis prioritas yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, khususnya hasil-hasil perkebunan seperti: kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, karet, tebu, lada, pala dan cengkeh.

c. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Sektor pertanian pada umumnya menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja miskin dan pada dekade ini menunjukkan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang cenderung menurun. Data Susenas 2018, menunjukkan bahwa sebanyak 49,8% kepala keluarga dari kelompok miskin dan rentan bekerja di sektor pertanian, dibandingkan dengan yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa sebanyak 13,4%. Rata-rata pendapatan sektor pertanian sebesar Rp. 743.399,- per bulan dan sektor perdagangan dan jasa akomodasi sebesar Rp. 1.218.955,- per bulan (Sakernas, 2017).



Rendahnya pendapatan tersebut berkaitan erat dengan produktivitas yang rendah, minimnya kepemilikan aset produktif dan terbatasnya akses terhadap lembaga pembiayaan.

Melalui kebijakan pengentasan kemiskinan, pemerintah terus menciptakan lapangan kerja produktif, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, menyempurnakan kebijakan bantuan sosial dan mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas manusia dilakukan melalui pendampingan pada berbagai program pembangunan pertanian, seperti melalui peningkatan peran penyuluh pertanian, konsultan pertanian, dan fasilitator lapangan.

Upaya lain terkait pengentasan rawan pangan dan penurunan masalah kekurangan gizi seperti *stunting* dan *wasting*, pemerintah mengembangkan variasi bantuan pangan, tidak hanya terbatas pada bantuan beras dan telur tetapi juga bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi protein nabati dan hewani seperti sayuran, daging, ikan dan makanan pendamping Air Susu Ibu (MPASI) serta perbaikan gizi anak usia sekolah.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang dapat dikembangkan untuk memperkuat karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai bangsa majemuk, beragam suku, adat-istiadat, bahasa dan agama yang membentuk kesatuan dalam ***Bhinneka Tunggal Ika***.

Gerakan revolusi mental ditujukan untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif mencakup :

1. peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien dan terpercaya; dan



2. penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.

Selain itu, pengembangan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan dilakukan melalui peningkatan budaya literasi. Pengembangan budaya IPTEK, inovasi, kreativitas dan daya cipta dilakukan dengan peningkatan budaya riset sejak usia dini dan pengembangan budaya produksi dengan kreativitas berbasis inovasi.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi dan perkotaan. Dukungan infrastruktur di sektor pertanian masih perlu untuk ditingkatkan seperti pada pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi, kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung dan penampung air lainnya, selain itu upaya penyediaan infrastruktur irigasi belum sepenuhnya diselaraskan dengan lahan pertanian baru, terutama pada lahan pertanian di luar Pulau Jawa.

Kebijakan optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi dilakukan melalui penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi serta penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi. Adapun untuk



peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi diterapkan melalui pembangunan jaringan irigasi baru, rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi, peningkatan efektifitas alokasi air irigasi dan pemanfaatan lahan suboptimal melalui revitalisasi lahan rawa.

Penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi dilakukan melalui pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk komoditas perkebunan, peternakan, hortikultura dan perikanan, pengembangan sistem mikro irigasi terutama lahan yang belum termanfaatkan dengan optimal. Untuk mencapai hal tersebut perlu peningkatan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan usaha dengan badan usaha dalam pengelolaan sistem irigasi.

Selain infrastruktur pengairan, penyediaan dan pengembangan infrastruktur pertanian diperlukan sejalan dengan perkembangan dan tuntutan modernisasi pertanian termasuk peran pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam mempercepat penyediaan barang dan jasa di sektor pertanian perlu ditingkatkan guna menggerakkan sektor ekonomi pertanian.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Penurunan kualitas lingkungan hidup berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas primer dan kelimpahan SDA. Karakteristik Indonesia yang memiliki resiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak ditangani dengan baik.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Perubahan iklim juga berdampak tinggi terhadap produktivitas sektor pertanian. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Penurunan emisi GRK sekarang semakin mendekati target penurunan GRK 26% di Tahun 2020 tercatat penurunan emisi GRK pada tahun 2018 mencapai 23,18% atau 452.613 Ribu Ton CO₂e/miliar rupiah.





Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi SDA secara berlebihan. Penurunan emisi GRK dan Intensitas Emisi akan sangat tergantung dari implementasi kebijakan di sektor energi, lahan dan gambut, industri, limbah, pertanian dan kelautan (pesisir). Sebagai target capaian dalam pembangunan rendah karbon di sektor pertanian dengan peningkatan ketahanan iklim dan pemulihan lahan berkelanjutan yaitu :

1. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian dengan target 0,251 persen PDB di tahun 2024
2. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan target 100 persen di tahun 2024.

Dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, arah kebijakan nasional yang didukung oleh sektor pertanian adalah :

1. Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem
2. Restorasi dan pemulihan lahan
3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian berkelanjutan

Adapun untuk pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), arah kebijakan fasilitas pendukung transformasi digital di antaranya: adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, *IoT*, *AI*, dll) dengan cara mendorong satu data dan mendorong pemanfaatan analisa dari *Big Data* untuk



meningkatkan ketepatan perencanaan, kinerja pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu, pemerintah mendorong terbentuknya *dashboard* data nasional untuk mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data yang saling interoperabilitas, terstandar serta dapat dibagikan.

g. **Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik**

Dalam mewujudkan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik, pembangunan pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang ada di RPJMN yaitu :

1. Optimalisasi kebijakan luar negeri. Program dan kerja sama luar negeri dan partisipasi aktor non-Pemerintah perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan citra Indonesia serta peningkatan surplus perdagangan dan mendorong masuknya investasi baik PMA maupun PMDN. Selain itu, memperkuat integritas wilayah NKRI dengan peningkatan pembangunan pertanian di perbatasan.
2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Guna penguatan implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan manajemen talenta, peningkatan sistem merit, penyederhanaan eselonisasi dan penataan jabatan fungsional. Penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui penataan kelembagaan instansi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi.

Reformasi sistem akuntabilitas kinerja melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran, termasuk transformasi pelayanan publik melalui pelayanan *publik* berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi dan penguatan pelayanan publik secara terpadu.

Dari agenda pembangunan nasional tersebut, Kementerian Pertanian lebih difokuskan dalam mendukung agenda pembangunan **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**.

1.2. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Nasional

RPJMN Tahun 2020-2024, telah menetapkan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkret dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara



(BUMN) dan masyarakat/Badan Usaha. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Masyarakat, BUMN dan pendanaan lainnya. Dari 41 *Major Project* di RPJMN, Kementerian Pertanian mendukung kepada *Project Major* di antaranya :

a. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

Proyek ini dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya *business model* korporasi petani dan nelayan dengan skala usaha ekonomi yang menerapkan konsep *society 5.0*. Selain itu, belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar. Sasaran manfaat dari proyek ini adalah meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun, meningkatnya produktivitas komoditas pertanian 5%, nilai tambah per tenaga kerja pertanian Rp. 59,80 juta/tenaga kerja pada tahun 2024.

b. Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit

Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sekitar 49 juta ton per tahun, yang juga merupakan ekspor komoditas andalan saat ini. Dengan adanya proyek ini diharapkan mampu meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23%, meningkatkan produksi bahan bakar nabati dan nilai tambah hasil perkebunan. Pada tahun 2024 ditargetkan produksi kelapa sawit sebesar 50,4 juta ton CPO. Pelaksanaan proyek ini merupakan sinergi dari Kementerian ESDM, Kementan, Kemendagri, Kementerian BUMN dan pihak swasta. Kementan mendukung dalam hal akselerasi, *replanting*, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), dan pengolahan sawit rakyat.

c. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat *Laa Pago* dan Wilayah Adat *Domberay*

Kabupaten di kawasan pegunungan sebagian besar ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai amanat PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga kawasan tersebut paling membutuhkan keberpihakan pembangunan. Dengan potensi agroklimat, kondisi sosial dan antropologis masyarakat, wilayah adat papua memiliki potensi pengembangan komoditas pertanian. Untuk itu, Kementerian Pertanian mendukung

pengembangan tanaman tahunan dan penyegar dengan prioritas komoditas kakao dan kopi.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERTANIAN

Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020-2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern sesuai dengan arahan Presiden agar melakukan transformasi ekonomi. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas SDM pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. Sedangkan pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki SDM yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerja sama dengan





pihak lain.

Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasis inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik: memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan daya saing.

Pengembangan sistem pola integrasi diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Peningkatan produksi pangan haruslah mampu meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memerhatikan kualitas pangan yang bergizi, beragam dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan dan bercita rasa bagi semua.

Kebijakan pangan juga diarahkan kepada pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah yang merupakan dampak dari terpusatnya distribusi dan alokasi serta pemanfaatan sumber daya di wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus merupakan solusi dalam mengurangi ketidakseimbangan antar wilayah.



Pertanian yang maju, mandiri dan modern dapat terwujud apabila para petani dan kelembagaan petani serta pemangku kepentingan lainnya siap untuk dapat melaksanakan implementasi amanah UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu dengan memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Prinsip dan penerapan perlindungan dan pemberdayaan petani juga dilakukan dalam pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, sehingga diharapkan pendekatan ini mampu mempercepat terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.

2.1. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
- d. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian.

2.2. Strategi Kementerian Pertanian

Strategi Kementerian Pertanian merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran



strategis.

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global maka kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, *onfarm*, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian.

Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan *research and development* (R&D) dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya peningkatan produktivitas (*yield*) tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (biaya logistik). Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di antaranya :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian
Peningkatan produksi dan produktivitas ini diarahkan dalam mendukung tercapainya target nasional baik ketahanan ekonomi maupun ketahanan pangan. Dengan meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan

meningkatkan ketahanan pangan nasional. Upaya-upaya atau langkah operasional dalam menjalankan strategi tersebut adalah :

- 1) Meningkatkan penyediaan benih unggul dan sertifikasi perbenihan, termasuk pengembangan benih biofortifikasi dan produk rekayasa genetik.
 - 2) Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil secara baik (*Good Agricultural Practices, Good Handling Practices* dan *Good Manufacturing Practices*);
 - 3) Mengurangi kehilangan hasil panen (*food loss*) dan limbah pangan (*food waste*);
 - 4) Meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman dan adaptasi serta mitigasi dampak perubahan iklim;
 - 5) Mengembangkan kawasan komoditas pertanian berbasis korporasi petani;
 - 6) Meningkatkan pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian;
 - 7) Meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal termasuk lahan rawa;
 - 8) Meningkatkan populasi hewan ternak;
 - 9) Mengembangkan sistem pertanian terpadu (pola integrasi tanaman-ternak);
 - 10) Menerapkan pertanian presisi.
2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional melalui langkah operasional sebagai berikut :
- 1) Membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional sebagai bagian sistem logistik pangan dan sistem pangan berkelanjutan;
 - 2) Memberdayakan usaha pangan skala kecil (*corporate farming*);
 - 3) Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi;
 - 4) Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan.



3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan melalui upaya-upaya sebagai berikut :
 - 1) Memperkuat dan memfasilitasi pengembangan sistem distribusi pemasaran dan pasar pangan di perdesaan;
 - 2) Menjaga stabilitas pasokan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah pusat dan daerah;
 - 3) Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat;
 - 4) Mendukung penyaluran bantuan pangan atau pangan bersubsidi sesuai pola konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan;
 - 5) Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

b. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Adapun strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai tambah dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Pengembangan dan penanganan pascapen dengan manajemen mutu sesuai permintaan pasar;
 - 2) Penguatan unit-unit pengolahan, penanganan pascapanen dan pemasaran di tingkat petani/keompok tani;
 - 3) Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian;
 - 4) Pengembangan kawasan/kluster komoditas pertanian berbasis korporasi petani;
 - 5) Pengembangan *cold storage* dan *silo* untuk komoditas strategis;
 - 6) Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan efisiensi sistem tata niaga pertanian;

- 7) Memperpendek rantai pasok dan efisiensi biaya produksi hingga pengolahan.
2. Peningkatan daya saing pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan Lumbung Pangan berorientasi ekspor di perbatasan;
 - 2) Digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perizinan ekspor dan investasi;
 - 3) Penguatan sistem perkarantina guna mendukung percepatan ekspor;
 - 4) Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu yang dilakukan;
 - 5) Diplomasi pengenaan Tarif Preferensi *Free Trade Area* (FTA);
 - 6) Penyelesaian sengketa dagang;
 - 7) Peningkatan akses pasar ekspor (*non-tradisional market*);
 - 8) Penguatan *Market Intelligence* di luar negeri;
 - 9) Memberikan kemudahan bagi eksportir dalam perizinan melalui OSS (*one single system*) atau program perizinan terpadu, sehingga prosesnya bisa lebih cepat;
 - 10) Mendorong generasi milenial untuk menjadi eksportir;
 - 11) Penerapan *inline inspection* yakni Badan Karantina Pertanian melakukan kunjungan langsung ke eksportir, dari tingkat budidaya hingga penanganan pascapanen sehingga mempermudah pelaku usaha dalam menangani produk yang akan diekspor;
 - 12) Percepatan Program I-Mace (*Indonesian Maps of Agriculture Commodity Export*) atau peta komoditas ekspor pertanian Indonesia guna mengetahui data sentra komoditas pertanian dan berpotensi ekspor;
 - 13) Penerapan elektronik sertifikat (*e-Cert*), sehingga produk pertanian yang diekspor lebih terjamin;
 - 14) Mendorong peningkatan KUR komoditas berorientasi ekspor;
 - 15) Penyiapan *pest list* untuk persyaratan ekspor, penanganan dampak perubahan iklim atau bencana alam, sampai penguatan kelembagaan perlindungan;



- 16) Harmonisasi persyaratan teknis dan perdagangan dengan negara tujuan, melakukan promosi produk, pengiriman misi dagang dan negosiasi *market access*;
- 17) Sinergisme dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain untuk mendukung ekspor

c. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Audit lahan pertanian;
 - 2) Meningkatkan luas areal pertanian;
 - 3) Menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan;
 - 4) Melestarikan dan/atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif;
 - 5) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar;
 - 6) Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marginal;
 - 7) Optimalisasi sumber daya air yang eksisting dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan;
 - 8) Peningkatan fungsi prasarana irigasi;
 - 9) Penerapan teknologi hemat air;
 - 10) Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam, dan parit/*longstorage*;
 - 11) Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur serapan.
2. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Mengoptimalkan skema KUR;

- 2) Mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis;
 - 3) Fasilitasi program asuransi pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida dengan langkah operasional sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat;
 - 2) Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih;
 - 3) Penumbuhan dan pematapan industri perbenihan;
 - 4) Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi;
 - 5) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan;
 - 6) Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.
4. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut :
- 1) Menyediakan perangkat peraturan tentang semua aspek alsintan;
 - 2) Pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman;
 - 3) Menumbuhkembangkan industri dan penerapan alsintan;
 - 4) Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri;
 - 5) Meningkatkan efisiensi penggunaan alsintan;
 - 6) Mengembangkan lembaga pengujian alsintan yang terakreditasi di daerah dalam rangka otonomi daerah;
 - 7) Menyediakan sistem pembiayaan/perkreditan bagi petani agar mampu membeli alsintan;
 - 8) Melatih keselamatan kerja lapang operator alsintan;
 - 9) Memasyarakatkan budaya mekanisasi pertanian kepada petani di perdesaan.;
 - 10) Mengembangkan teknologi pesawat nirawak untuk pertanian.

d. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian

Pengembangan SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing



tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian adalah sebagai berikut :

1. Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Melakukan standardisasi semua mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pertanian agar menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
 - 3) Peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan pengajar;
 - 4) Penerapan sistem pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
 - 5) Memperkuat jaringan dan kerja sama pelatihan dengan dunia usaha;
 - 6) Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
 - 7) Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital.
2. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Inisiasi penumbuhan wirausahawan muda pertanian bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dan swasta;
 - 2) Pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan/ pengawalan pembangunan pertanian;
 - 3) Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang difokuskan bidang pertanian maju, modern dan mandiri bagi pemuda tani;
 - 4) Pelatihan dan magang bagi pemuda tani dalam bidang pertanian.
3. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan *e-learning*;
 - 2) Pengembangan *database* penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;

- 3) Pengembangan sistem informasi penyuluh pertanian.
4. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional sebagai berikut :
 - 1) Penerapan SOP pelatihan setaraf kelas internasional;
 - 2) Pengembangan balai pelatihan sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
 - 3) Peningkatan profesionalisme dan kemampuan widyaiswara.
5. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan transformasi pendidikan pertanian agar menjadi lembaga pendidikan vokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing;
 - 2) Peningkatan kualitas pendidik/pengajar agar bisa menghasilkan peserta didik menjadi pengusaha, penggerak dan pencipta lapangan kerja;
 - 3) Penguatan program dan kerja sama pendidikan pertanian.
6. Penguatan kelembagaan petani dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP Korporasi Petani/ Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha;
 - 2) Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani;
 - 3) Peningkatan skala ekonomi KUB petani muda.

e. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima

Pelayanan pemerintah ditujukan untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai syarat salah satu meningkatnya pelayanan publik termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi dan tumbuh kembangnya dunia usaha. Melalui birokrasi yang efektif dan efisien maka terwujudlah cita-cita reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sehingga pelayanan pemerintah memberikan kepuasan prima kepada



masyarakat. Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan RPJPN 2005-2025 ditujukan untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi meliputi : mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.

Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima adalah sebagai berikut :

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut :
 - 1) Penerapan manajemen talenta ASN;
 - 2) Peningkatan sistem merit ASN;
 - 3) Penyederhanaan eselonisasi
 - 4) Penataan jabatan fungsional.
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui :
 - 1) Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
 - 2) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui :
 - 1) Perluasan implementasi sistem integritas;
 - 2) Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - 3) Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
4. Transformasi pelayanan publik, melalui:
 - 1) Pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*);
 - 2) Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
 - 3) Penguatan ekosistem inovasi;
 - 4) Penguatan pelayanan terpadu.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

2.3. Pengarusutamaan dan Proyek Prioritas Pertanian

Target-target pembangunan nasional khususnya di sektor pertanian perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya mulai dari Kementerian/Lembaga Negara lainnya, Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, akademisi, peneliti, penyuluh, pedagang/pengusaha dan petani yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dalam satu arah yang sama atau satu gerakan. Setiap kegiatan utama di Kementerian Pertanian perlu mengadopsi pengarusutamaan yang berada di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) dan proyek nasional 2020-2024. Adapun pengarusutamaan dan proyek prioritas sektor pertanian adalah sebagai berikut :

a. Korporasi petani

Korporasi petani dibangun melalui pemberdayaan petani dengan mengkonsolidasikan petani dalam suatu kelembagaan petani (kelompok/gabungan kelompok tani) yang didorong untuk bertransformasi menjadi kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) diharapkan meningkatkan skala usaha petani karena tergabung dalam kelompok yang lebih besar, menjalankan usaha dengan manajemen yang profesional, meningkatkan aksesibilitas permodalan dan infrastruktur, jangkauan pasar, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 80 mengamanatkan Kelembagaan Ekonomi Petani dapat berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan





Pertanian Berbasis Korporasi Petani, menyatakan bahwa korporasi petani merupakan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Kepemilikan modal petani yang besar ini berfungsi untuk meningkatkan produktivitas, skala ekonomi, daya saing, pendapatan petani dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.

Pendekatan pembangunan pertanian melalui pengembangan kawasan dalam suatu sistem usaha tani terpadu yang mengintegrasikan subsistem hulu, *on farm*, hilir, pengolahan dan pemasaran serta penunjang. Konsep korporasi petani memerlukan terobosan dalam mengubah pola pikir petani agar menjadi pelaku utama bisnis pertanian, sehingga perlu dilakukan penguatan kapasitas baik aspek usaha tani maupun aspek manajerial. Program atau kegiatan di pemerintah pusat mulai penguatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian, revitalisasi perbenihan, pengembangan pupuk organik, optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi, pembangunan sarana panen air, mekanisasi pertanian, hingga pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta bantuan akses pembiayaan dan asuransi petani, bisa menjadi modal besar dalam menumbuhkan dan mengembangkan korporasi petani.

Amanah RPJMN 2020-2024 menyatakan bahwa salah satu Proyek Nasional (*Major Project*) untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani, kegiatan ini akan dikembangkan di 1.029 klaster komoditas pertanian dengan jumlah korporasi petani yang dikembangkan sebanyak 350 unit. Inti dari pengembangan korporasi petani dilakukan melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum yang mampu menciptakan unit usaha bisnis pertanian secara mandiri maupun bermitra dengan badan usaha lainnya dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing untuk mewujudkan kesejahteraan petani.



Korporasi petani selain bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, juga meningkatkan aksesibilitas pemasaran dengan mengintegrasikan antara produk pertanian baik segar maupun olahan dengan akses pasar, seperti Toko Tani Indonesia sebagai simpul distribusi perdagangan komoditas pangan dan pertanian yang membantu petani dalam memperluas jaringan pemasarannya. Melalui pengembangan unit bisnis di dalam korporasi petani, diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar petani melalui sinergi dan kerja sama dengan pelaku usaha besar lainnya karena korporasi petani memiliki potensi untuk menjadi organisasi bisnis yang modern di antaranya yaitu :

- a. Memiliki skala ekonomi sesuai prinsip pengelolaan usaha yang efisien;
- b. Produksi disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau industri pengguna bahan baku yang dihasilkan oleh anggota korporasi petani;
- c. Menjadi organisasi bisnis yang dikelola secara profesional untuk menjamin keberlanjutan usaha pertanian;
- d. Menyediakan bahan baku yang berkualitas bagi industri besar secara berkesinambungan;
- e. Menciptakan kemitraan antara korporasi petani dan usaha besar yang saling menguntungkan bagi pertumbuhan pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian;
- f. Mampu mengakses sumber pendanaan inklusif untuk meningkatkan produktivitas sekaligus ketahanan pangan nasional;
- g. Dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan badan usaha lainnya untuk membentuk unit usaha profesional yang berkualitas dan berdaya saing.

Proyek nasional korporasi petani ditargetkan meningkatkan produktivitas hingga 5% dan meningkatkan nilai tambah tenaga kerja pertanian menjadi Rp. 59,80 juta/petani/tahun pada tahun 2024. Proyek Nasional pengembangan korporasi petani merupakan kerja bersama dan sinergi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bergerak di sektor pertanian baik lintas kementerian dan lembaga, pelaku usaha termasuk Perguruan Tinggi. Berikut gambaran Proyek Nasional Korporasi Petani.



Tabel 4. Penguatan Jaminan Usaha Korporasi Petani

Latar Belakang	<div>1. Belum terbentuk model bisnis korporasi petani dengan skala ekonomi</div> <div>2. Belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar</div> <div>3. Akses sumber daya produktif yang rendah</div> <div>Rantai pasok yang panjang</div>				
Manfaat	<div>1. Meningkatnya pendapatan petani</div> <div>2. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian</div> <div>Pertanian yang mandiri</div>				
Indikasi Target:	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Peningkatan produktivitas komoditas	5%	5%	5%	5%	5%
2. Nilai Tambah per tenaga kerja pertanian	Rp. 49,20 juta/ tenaga kerja	Rp. 51,70 juta/ tenaga kerja	Rp. 54,30 juta/ tenaga kerja	Rp. 57,00 juta/ tenaga kerja	Rp. 59,80 juta/ tenaga kerja
3. Kelembagaan	Ploting 5 korporasi petani	33 Korporasi petani	65 Klaster korporasi petani	150 korporasi petani	350 korporasi petani
Highlight Proyek	<div>1. Penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> dan <i>Precision Farming</i></div> <div>2. Penguatan kelembagaan petani</div> <div>3. Investasi, pembiayaan dan asuransi sektor pertanian</div> <div>4. Kemitraan KUKM dan wirausaha pertanian</div> <div>5. Fasilitasi pemasaran</div>				

Sumber: RPJMN 2020-2024

Pengembangan korporasi petani dilakukan melalui pendekatan kawasan. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan pertanian pada lokasi yang memenuhi persyaratan *agroekologis*, memenuhi kelayakan *agroekonomi* dan *agro-sosio-teknologi*, aksesibilitas lokasi memadai, dan *diseconomic-externality* yang ditimbulkannya dapat dikendalikan. Pengembangan kawasan pada hakikatnya terdiri atas melakukan pemetaan, evaluasi potensi lahan dan sentra-sentra produksi pertanian, seperti tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan lainnya. Pengembangan

kawasan komoditas dilakukan berdasarkan Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional yang menetapkan kawasan komoditas prioritas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di seluruh kabupaten.

b. Kolaborasi dan Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian dalam Satu Komando

Kolaborasi Strategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan pembangunan pertanian ini bertujuan mensinergikan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pertanian dengan strategi kolaborasi berupa Gerakan Satu Komando secara berjenjang mulai dari pusat hingga ke kecamatan.

Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan TIK sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi : 1) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan SDM pertanian; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; 3) Pusat pembelajaran sebagai wadah dan wahana untuk peningkatan kapasitas SDM pertanian, melalui proses belajar mengajar, dalam bentuk bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapangan/*Demplot/Demfarm/Demarea*); 4) Pusat konsultasi agribisnis antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan



5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Salah satu tujuan dari gerakan komando strategis di kecamatan yaitu terjaminnya pemutakhiran dan arus data pembangunan pertanian dari kecamatan sampai Pusat. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian dengan didukung oleh *stakeholder* terkait yang dikelola secara terbuka dan *real time*. *Dashboard* besar satu data sebagai sarana komunikasi dan informasi di tingkat nasional dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai pusat komando dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pembangunan pertanian dan pangan.

c. Pertanian Keluarga (*Family Farming*)

Pertanian keluarga atau *family farming* (FAO,2014) merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga dengan sebagian besar bergantung pada tenaga kerja keluarga baik perempuan dan laki-laki dan merupakan basis produksi yang berkelanjutan. Konsep pertanian keluarga di Indonesia sudah dipraktikkan sejak lama, keluarga petani mengolah lahan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Dalam acara Komite Ketahanan Pangan Dunia ke-46 yang digelar pada 17 Oktober 2019, Indonesia menyatakan bentuk keseriusan komitmennya dalam menguatkan *family farming* atau pertanian keluarga dunia, setelah PBB menetapkan tahun 2019-2028 sebagai Dekade PBB untuk Pertanian Keluarga. Sebagai bukti dukungan nyata terhadap Dekade Pertanian Keluarga, Indonesia telah menyiapkan Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga yang mencakup keberlanjutan pertanian keluarga, kesetaraan *gender*, peningkatan kapasitas organisasi petani, dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani. Untuk itu, program dan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang mendukung pertanian keluarga diarahkan untuk :

a. Mengembangkan lingkungan kebijakan yang memungkinkan untuk memperkuat pertanian keluarga;

- b. Keberlanjutan generasi pertanian keluarga;
- c. Memperkuat organisasi keluarga petani dan kapasitas mereka untuk menghasilkan pengetahuan, mewakili kepentingan petani dan menyediakan layanan inklusif di daerah pedesaan;
- d. Meningkatkan inklusi sosial-ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan petani keluarga, rumah tangga pedesaan dan masyarakat;
- e. Mempromosikan keberlanjutan pertanian keluarga untuk sistem pangan yang tahan terhadap perubahan iklim;
- f. Memperkuat *multidimensionalitas* pertanian keluarga untuk mempromosikan inovasi sosial yang berkontribusi pada pengembangan wilayah dan sistem pangan yang melindungi keanekaragaman hayati, lingkungan dan budaya.

Pelaksanaan program *family farming* ini perlu didukung keberlanjutannya agar generasi muda penerus pembangunan pertanian mampu mengembangkan usaha pertanian berbasis korporasi yang terintegrasi dengan pengelolaan lahan-lahan pertanian oleh keluarga petani secara modern sehingga mampu meningkatkan manajemen usaha taninya serta mampu menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian.

d. **Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*)**

Sebagaimana RPJMN 2020-2024 yang telah mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam agenda-agenda pembangunan nasional maka Kementerian Pertanian sebagai bagian dari pendukung pembangunan nasional juga telah mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertanian berkontribusi pada pencapaian SDGs, karena korban paling serius dari permasalahan SDGs terjadi di sektor pertanian. Kemiskinan, kelaparan



dan malnutrisi di perdesaan berhubungan dengan pertanian, bahkan pertanian diharapkan menjadi sektor unggulan dalam pengentasan kelaparan dengan peningkatan akses pangan masyarakat.

Tantangan lain dalam turunnya produktivitas pertanian, salah satunya disebabkan adanya dampak perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan dan banjir. Perubahan iklim yang ekstrim berupa musim kemarau panjang (kekeringan) dan banjir besar yang terjadi di Indonesia sangat berdampak terhadap sektor pertanian. Hasil berbagai riset menunjukkan bahwa kenaikan suhu bumi antara 1,5 hingga 4 derajat celsius tidak hanya meningkatkan risiko bencana alam tetapi juga berdampak terhadap penurunan produksi dan produktivitas pangan secara signifikan. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mendukung dunia untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius dan beradaptasi terhadap dampak terburuk perubahan iklim melalui *Intended Nationally Determined Contributions* (INDCs).

Perubahan iklim juga dapat menimbulkan potensi kerugian PDB hingga 20 persen, Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk mewujudkan perencanaan pembangunan rendah karbon atau *Low Carbon Development Indonesia* (LCDI). Oleh karena itu, sektor pertanian harus menjalankan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan yang diharapkan mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, pembangunan pertanian juga telah menerapkan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam SDG's. Pengarusutamaan gender (PUG) ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan *gender* dalam pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

2.4. Program Kementerian Pertanian

Berdasarkan Kerangka Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian yang telah ditetapkan, maka program-program Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sesuai dengan kewenangannya dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 5. Program dan Sasaran Program Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

No.	Program	Sasaran Program
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 2. Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas
2.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian 2. Meningkatnya kualitas pengawasan internal 3. Meningkatnya maturitas SPIP
3.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis tanaman pangan 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian tanaman pangan 3. Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan yang sesuai dengan kebutuhan 4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman pangan
4.	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan komoditas strategis hortikultura 2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian 3. Penyediaan sarana hortikultura sesuai kebutuhan 4. Terkendalinya serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura
5.	Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pertumbuhan produksi dan ekspor produk perkebunan nasional. 2. Menurunnya impor produk perkebunan nasional.
6.	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak 2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak 4. Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan



No.	Program	Sasaran Program
7.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan
8.	Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	1. Termanfaatkannya teknologi dan inovasi pertanian
9.	Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1. Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian
10.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Meningkatnya lembaga distribusi pangan yang mandiri 2. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan 3. Meningkatnya pengawasan pangan segar yang beredar 4. Meningkatnya konsumsi sayur, buah dan daging
11.	Peningkatan Kualitas Pengkantin dan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	1. Peningkatan daya saing pertanian (Ekspor) 2. Aman dari ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan keamanan hayati 3. Terkendalinyapenyebaran HPHK pada hewan 4. Tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien
12.	Pendidikan Pertanian	1. Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian

Program-program di atas telah mengacu kepada tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian yang dijadikan rujukan setiap kegiatan-kegiatan dan indikatornya yang tersaji secara lengkap dalam lampiran. Setiap program memiliki indikator kinerja (*key performance index*) yang melekat dalam setiap sasaran programnya.

Pada awal tahun 2020, Kementerian Keuangan menginisiasi perancangan kembali (*redesign*) penyederhanaan program di masing-masing Kementerian/ Lembaga. Dengan adanya perancangan kembali (*redesign*) tersebut maka

sistem penganggaran dan Program Indikatif Kementerian Pertanian pada tahun 2021-2024 akan berubah menjadi :

Tabel 6. Program dan Sasaran Program Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024

No.	Program	Sasaran Program
1.	Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 2. Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas 3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementan 4. Meningkatnya kualitas pengawasan internal 5. Meningkatnya maturitas SPIP
2.	Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Termanfaatkannya teknologi dan inovasi pertanian
3.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian
4.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis 2. Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen pertanian yang sesuai dengan kebutuhan 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan 4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI sektor pertanian 5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai kebutuhan 6. Meningkatnya lembaga distribusi pangan yang mandiri 7. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan 8. Meningkatnya pengawasan pangan segar yang beredar
		<ol style="list-style-type: none"> 9. Aman dari ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan keamanan hayati 10. Tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien



No.	Program	Sasaran Program
5.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian 2. Meningkatnya Pertumbuhan ekspor pertanian.

Perubahan program ini akan berdampak dalam perubahan susunan sasaran program, kegiatan dan indikatornya dalam matriks target kinerja 2020-2024 terlampir.

3. KERANGKA REGULASI

Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi dilakukan dengan memerhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi yang mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami dan tertib serta memberikan manfaat konkret dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Kerangka regulasi disusun sebagai bentuk operasional dari arah kebijakan dan dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan guna mencapai sasaran strategis. Untuk memastikan dukungan kualitas dan kuantitas regulasi, harus diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur;
2. Memerhatikan aspek biaya dan manfaat (*Cost and Benefit Analysis/ CBA*);
3. Kebutuhan regulasi dalam pencapaian visi, misi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
4. Pelibatan pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu strategi penataan regulasi pendekatan *omnibus law* dapat diterapkan dengan opsi penyederhanaan atau pencabutan dan perevisian atau penggabungan beberapa regulasi yang substansinya hampir sama, tumpang tindih dan konflik. Inti pendekatan *omnibus law* adalah evaluasi, pengkajian, penelitian terkait regulasi dan pilihan kebijakan untuk memastikan regulasi yang tepat, fleksibel dan akuntabel. Mengingat dinamisnya perkembangan pembangunan, maka kebutuhan kerangka regulasi disesuaikan kebutuhannya melalui Rencana Kerja setiap tahun.

Kebutuhan regulasi pada agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan arah kebijakan Kementerian Pertanian di antaranya :

a. Terjaganya ketahanan pangan nasional, regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Revisi UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. RPP tentang Keamanan Pangan;
3. Revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
4. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
5. RPerpres tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. RPerpres tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional dan Rencana Pembangunan Rendah Karbon;
7. RPermentan tentang Pengawasan Produk Rekayasa Genetik; dan
8. RPermentan tentang Komando Strategi Penggilingan Padi.

b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, regulasi yang dibutuhkan di antaranya :

1. RPP tentang Label dan Iklan Pangan;
2. RPP tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan;
3. RPerpres Pengembangan Tanaman Obat/Jamu untuk Industri
4. RPermentan tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit; dan
5. RPermentan tentang Penerapan Penanganan dan Pemasaran Biji Kakao.

c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan saran pertanian, regulasi yang dibutuhkan di antaranya :

1. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. RPerpres tentang Asuransi Pertanian;
3. RPerpres tentang Perlindungan Lahan Pertanian;
4. RPermentan tentang Perlindungan Perkebunan;



5. RPermentan tentang Perubahan Kedua Atas Permentan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
6. RPermentan tentang Fasilitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; dan
7. RPermentan tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.

d. Meningkatnya kualitas SDM pertanian, regulasi yang dibutuhkan di antaranya :

1. RPerpres tentang Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani; dan
2. RPerpres tentang Optimalisasi Penyuluhan Pertanian.

Kebutuhan regulasi dan urgensinya ditampilkan secara lengkap dalam matriks kerangka regulasi Renstra ini (lampiran 3).

4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/ lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara), yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, maka kelembagaan diarahkan mendukung pencapaian agenda pembangunan yaitu meningkatnya pemantapan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing serta terwujudnya reformasi birokrasi.

Dalam rangka pencapaian agenda pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Pertanian perlu diperluas menangani urusan pertanian dan



urusan pangan. Bertanggung jawab tidak hanya pada produksi komoditas pertanian, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemantapan ketahanan pangan. Hal ini menuntut Kementerian Pertanian untuk bertransformasi menjadi organisasi yang profesional, responsif, adaptif, inovatif, dan memiliki kemandirian dalam pengelolaannya

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020, bahwa tugas kementerian menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, disesuaikan dengan peran kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dengan menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi :

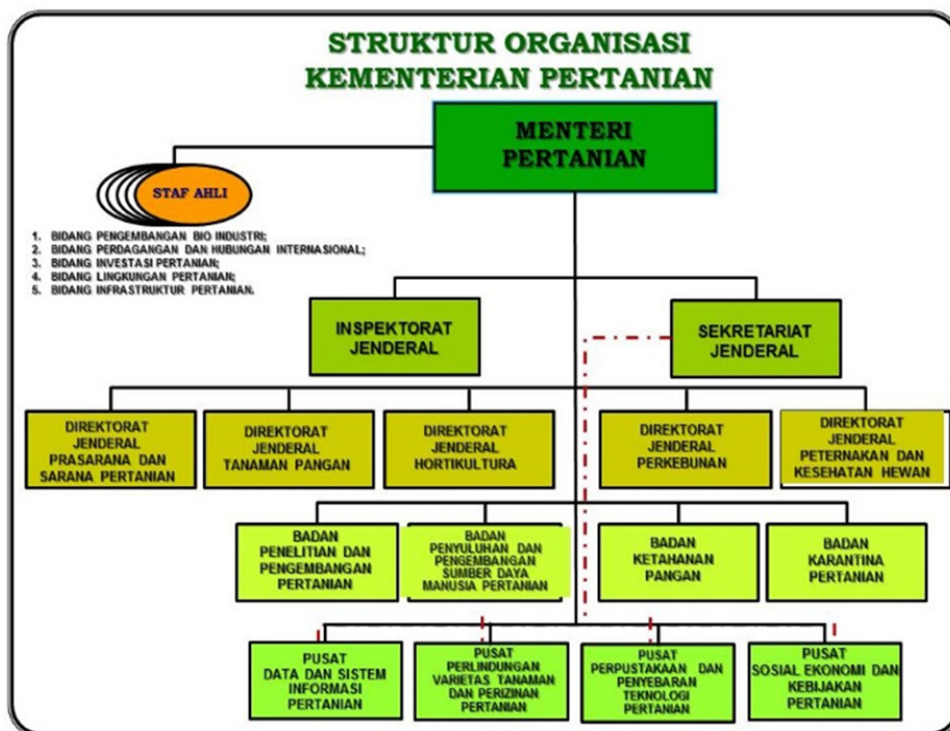
- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan peningkatan nilai tambah, daya saing, pemasaran hasil pertanian, dan pemantapan ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan peningkatan nilai tambah, daya saing, pemasaran hasil pertanian, dan pemantapan ketahanan pangan
- c. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi di bidang pertanian;
- d. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
- f. pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;



- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Kementerian Pertanian terdiri atas :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- d. Direktorat Jenderal Hortikultura;
- e. Direktorat Jenderal Perkebunan;
- f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- j. Badan Ketahanan Pangan;
- k. Badan Karantina Pertanian;
- l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
- m. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
- n. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
- o. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; dan
- p. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian.



Gambar 25. Struktur Organisasi Kementerian Pertanian

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pertanian dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kementerian Pertanian memiliki 162 (seratus enam puluh dua) UPT, berkedudukan berada di bawah Sekretariat Jendral, Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Litbang Pertanian, Badan Karantina Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. UPT merupakan organisasi mandiri, melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya, dan memiliki peran strategis dalam menyukkseskan program pembangunan pertanian terutama program strategis percepatan swasembada pangan. Mekanisme dan tata kerja antara UPT dengan organisasi induknya serta pemangku kepentingan lainnya perlu dioptimalkan dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja dan pelayanan UPT. Kebijakan dalam penataan UPT lebih difokuskan pada evaluasi organisasi UPT untuk memantapkan kinerja organisasi unit kerja eselon I. Kelembagaan pemerintah ke depan harus mampu menjadi mesin birokrasi yang efektif (*Machinery of*



Government) guna menyelesaikan setiap masalah yang muncul dengan cepat, tepat, dan efisien, salah satunya dengan pelaksanaan audit dan evaluasi di bidang kelembagaan.

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak terlepas dari kesiapan dan kompetensi SDM pertanian, dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program dan melakukan evaluasi serta *monitoring* pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Fokus utama peningkatan kapasitas SDM tersebut dilakukan melalui perencanaan pengembangan SDM dengan berbasis pada kinerja pengembangan kompetensi. Terkait dukungan sumber daya aparatur sipil negara, Kementerian Pertanian didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di 11 (sebelas) unit kerja eselon I baik yang berada pada kantor pusat maupun unit pelaksana teknis di daerah. Mengantisipasi kekurangan SDM yang ada terkait dengan perubahan lingkungan strategis, dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai melalui peta jabatan yang ideal berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan mengacu pada aplikasi e-formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB.

Penyederhanaan birokrasi disampaikan Presiden dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019 - 2024, dengan menyederhanakan eselonisasi menjadi 2 level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, dan menghargai kompetensi. Upaya yang sedang Kementerian Pertanian lakukan adalah penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, pengalihan 1.264 jabatan eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional, penyusutan birokrasi ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja.

Pemangkasan jalur birokrasi dan perbaikan sistem manajerial yang dilakukan juga dengan merestrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertanian meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran serta meningkatkan kinerja aparatur, selanjutnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada *outcome*. Program-program tersebut dilaksanakan

secara konsisten dan berkelanjutan guna mencapai tujuan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang prima, birokrasi yang bersih dan SDM yang profesional.

Kementerian Pertanian memiliki rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur, serta pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi/lembaga pemerintah. Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas *dekonsentrasi* dan asas tugas pembantuan serta *desentralisasi*. Program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas *dekonsentrasi* hanya dapat dilaksanakan oleh dinas provinsi. Sedangkan program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di dinas provinsi maupun di dinas kabupaten/kota. Penataan dan Penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Pertanian dari pusat sampai ke daerah dilakukan dengan memerhatikan kebijakan pembangunan nasional, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta peraturan perundangan terkait yang berlaku. Seiring dengan perkembangan, tantangan, dan tuntutan perubahan, baik eksternal maupun internal, maka organisasi dan tata laksana Kementerian Pertanian harus dijalankan secara dinamis untuk menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).



A background image of a cocoa tree with several pods hanging from the branches. The pods are in various stages of ripeness, ranging from green to brown. The leaves are large and green.

BAB

4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN





1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian dalam mendukung tercapainya kebijakan pembangunan nasional, Kementerian Pertanian menetapkan 3 (tiga) tujuan dengan 9 (sembilan) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Renstra ini. Target kinerja Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam periode 2020-2024. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Kementerian Pertanian.

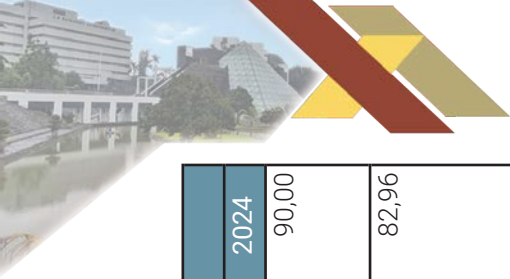
Indikator kinerja tersebut kemudian di turunkan (*cascading*) ke dalam masing-masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian *outcome* yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya. Untuk lebih mendetailkan lagi, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Pertanian secara rinci disajikan pada Tabel 7, sedangkan setiap indikator sasaran program dan kegiatan tertuang dalam matriks target kinerja pada lampiran Renstra ini.

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian 2020-2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2 Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	1,30	1,35	1,40	1,45	2,00
		3 Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian	%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	4 Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	%	80,00	83,50	87,00	90,00	93,00
		5 Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaaan yang Diselesaikan	%	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00
4	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	6 Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	%	65,00	70,00	70,00	75,00	75,00
		7 Teknologi yang diterapkan oleh petani	%	70,00	74,00	78,00	82,00	85,00



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
5	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	8 Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks	62,55	63,10	63,56	64,05	64,55
		9 Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92
6	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPl pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	10 Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	58,45	58,71	59,34	60,53	62,56
		11 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	78,90	79,50	80,10	80,80	81,60
7	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	12 Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
		13 Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	
		14	Persentase Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian	%	65,00	75,00	80,00	85,00	90,00
8	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	15	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	79,96	80,71	81,46	82,21	82,96
9	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	16	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,23	91,61	91,98	92,36	92,73



2. KERANGKA PENDANAAN

Pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan pertanian, serta pencapaian target sasaran utama membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran, serta penggunaan dana yang efektif dan efisien. Pendanaan pembangunan pertanian berasal dari pemerintah pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) dan dari sumber lain yaitu: (a) pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; (b) swasta, BUMN, dan BUMD; (c) investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA); (d) lembaga keuangan dan perbankan (skema kredit dan kredit komersial); dan (e) swadaya masyarakat. Sumber dana pembangunan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat karena besarnya nilai dana yang dibutuhkan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian sangatlah besar. Sebagian besar merupakan pembiayaan bersumber dari swasta, perbankan dan masyarakat. Untuk itu, indikasi kebutuhan pendanaan dalam setiap program Kementerian Pertanian dalam pelayanan urusan pemerintahan sektor pertanian secara terinci tercantum dalam Matriks Kinerja di lampiran

Secara umum, pemerintah mengalokasikan dana APBN ke belanja Kementerian/Lembaga lain dan belanja non Kementerian/Lembaga serta transfer ke daerah untuk pembangunan pertanian. Indikasi kebutuhan pendanaan pembangunan pertanian disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Pertanian (Triliun Rupiah)

URAIAN		2020	2021	2022	2023	2024
I	Kementerian Negara/Lembaga					
	1. 018 Kementerian Pertanian	19,5	22,1	23,5	25,1	26,8
	2. 033 Kementerian PU dan PERA	11,3	11,4	12,3	12,8	13,3

URAIAN		2020	2021	2022	2023	2024
II	Non K/L					
	1. Subsidi					
	a. Subsidi Pupuk	26,6	23,1	20,6	18,0	15,4
	2. Belanja Lain-lain					
	a. Cadangan beras pemerintah	2,8	2,8	2,8	2,8	4,8
	b. Cadangan stabilitas harga pangan dan ketahanan pangan	2,6	3,1	3,6	4,1	4,6
	3. Transfer ke daerah					
	a. DAK irigasi	2,1	3,0	3,1	3,2	4,1
	b. DAK Pertanian	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0
	TOTAL	66,9	67,9	68,9	69,9	71,1

Selain dari APBN, diharapkan pembiayaan pembangunan pertanian dari KUR bisa masuk ke sektor pertanian sebesar 50 (lima puluh) triliun rupiah tiap tahunnya. Di bidang investasi pertanian, guna mendukung pencapaian target pembangunan pertanian dibutuhkan investasi sebesar 200 (dua ratus) triliun rupiah pada tahun 2024 yang berasal dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.



BAB

5

PENUTUP





Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai penjabaran dari RPJMN tahun 2020-2024 di bidang pertanian. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Kementerian Pertanian.

Pertanian maju, mandiri dan modern untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong menjadi visi bersama bagi seluruh elemen di Kementerian Pertanian khususnya, serta pemangku kepentingan di bidang pertanian secara umum. Visi ini tidak akan bisa dicapai bila sinergitas horizontal dan vertikal tidak terjalin dengan baik di lingkungan Kementerian Pertanian, serta tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya





LAMPIRAN



Lampiran 1. TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2020-2024

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					K/L TERKAIT
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan	1 Global food security index	Indeks	62,6	64,0	65,5	66,9	68,4	69,8	MULTI K/L
		2 Skor Pola Pangan Harapan	Skor	86,4	90,4	91,6	92,8	94,0	95,2	KEMANTAN, KEMENKES, KKP & KEMENDIKBUD
		3 Angka Kecukupan Energi (AKE)	kkal/kap/ hari	2.121	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	KEMANTAN, KEMENKES, KKP & KEMENDIKBUD
		4 Angka Kecukupan Protein (AKP)	gram/ kapita/ hari	62,87	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	KEMANTAN, KEMENKES, KKP & KEMENDIKBUD
		5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevelence of Undernourishment/ PoU</i>)	%	6,7	6,2	5,8	5,5	5,2	5,0	KEMANTAN, KEMENKES, & KKP
		6 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (<i>Food Insecutiry Experience Scale/ FIES</i>)	%	5,8	5,2	4,8	4,5	4,2	4,0	KEMANTAN
		7 Ketersediaan beras	Juta ton	38,4	39,2	42,7	44,0	45,4	46,8	KEMANTAN, BULOG, KEMENDAG
		8 Ketersediaan protein hewani	Juta ton	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	KEMANTAN



NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					K/L TERKAIT
					2020	2021	2022	2023	2024	
		9 Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi	% Penerima BPNT	480 ton	10-20%	40	60	80	100	BULOG, KEMENSOS, KEMANTAN, KEMENKES
		10 Persentase pangsa pangan organik	%	2	5	8	10	15	20	KEMANTAN
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	11 Nilai Tambah per Tenaga Kerja Pertanian	Juta	46,9	49,2	51,7	54,3	57	59,8	KEMANTAN
		12 Peningkatan PDB Pertanian Sempit	%	3,30	3,36	3,46	3,56	3,66	3,76	KEMANTAN
		13 Pertumbuhan PDB Perkebunan	%	4,90	4,90	5,00	5,00	5,00	5,00	KEMANTAN
		14 Pertumbuhan PDB Hortikultura	%	5,80	5,80	5,90	5,90	5,90	5,90	KEMANTAN
		15 Nilai Tukar Petani	Indeks	103	103	103	104	104	105	KEMANTAN
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	16 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	79,05	79,96	80,71	81,46	82,21	82,96	KEMANTAN
		17 Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	KEMANTAN



Lampiran 2. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERTANIAN
(Berdasarkan 12 Program untuk Tahun 2020, sedangkan matriks kinerja dengan 5 program untuk tahun 2021-2024 akan dipetakan ulang)

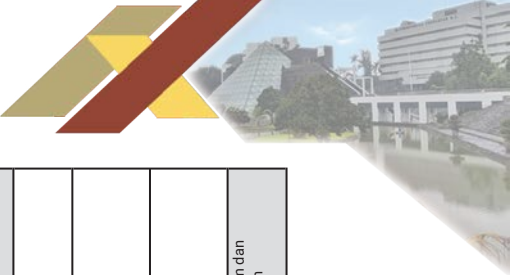
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
KEMENTERIAN/LEMBAGA															
	SS1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri														
	1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	%	3,6	Pusat	3,7	3,8	3,9	4	4,1						
															Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Ketahanan Pangan
	SS2. Meningkatkan Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional														
	2. Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	1,29	Pusat	1,3	1,35	1,4	1,45	2						Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3. Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan	%	0,1	Pusat	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1						Badan Karantina Pertanian
	SS3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional														
	4. Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	%	N/A	Pusat	80	83,5	87	90	93						Badan Ketahanan Pangan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
	5. Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinahan yang Diselesaikan	%	40	Pusat	41	42	43	44	45						Badan Karantina Pertanian
	SS4. Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian														
	6. Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	%	60	Pusat	65	70	70	75	75						Balitbangtan
	7. Teknologi yang Diterapkan oleh Petani	%	N/A	Pusat	70	74	78	82	85						BPPSDMP
	SS5. Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan														
	8. Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	Indeks	N/A	Pusat	62,55	63,1	63,56	64,05	64,55						Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
	9. Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	Indeks	N/A	Pusat	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92						Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SS6. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan														
	10. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	N/A	Pusat	58,45	58,71	59,34	60,53	62,56						Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan
	11. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	N/A	Pusat	78,9	79,5	80,1	80,8	81,6						Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
	12. Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina	%	N/A	Pusat	90	91	92	93	94						Badan Karantina Pertanian
	SS7. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional														
	13. Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya	%	N/A	Pusat	39	42	45	48	51						BPPSDMP
	14. Persentase Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian	%	N/A	Pusat	65	75	80	85	90						BPPSDMP
	SS8. Terselenggaranya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima														
	15. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	79,05	Pusat	79,96	80,71	81,46	82,21	82,96						Seluruh Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
	SS9. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas														
	16. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	89,11	Pusat	91,23	91,61	91,98	92,36	92,73						Seluruh Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERTANIAN									1.886.679	1.943.000	2.001.000	2.061.000	2.123.000	SEKRETARIAT JENDERAL
	Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Jenderal yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima														
	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal (PM4PRB)	Nilai	22	Pusat	23	23	23	24	24						
	Tingkat Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	Skala Likert (1 - 4)	3,11		3,13	3,15	3,17	3,19	3,21						
	Terkelolanya Anggaran Sekretariat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas														
	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	Nilai	89,90		92,04	92,42	92,8	93,18	93,55						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Pembinaan hukum bidang pertanian	Legislasi dan advokasi hukum yang optimal			Pusat							11.188	11.522	11.866	12.222	12.589	Biro Hukum
	Nilai Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Nilai			1.25	1.27	1.29	1.30	1.31							
	Tingkat Kepuasan Layanan Biro Hukum	Skala Likert (1 - 4)			3.13	3.15	3.17	3.19	3.21							
	Pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral									25.607	22.426	23.096	23.788	24.504	Biro Kerjasama Luar Negeri	
	Terwujudnya Layanan Kerjasama Internasional yang Prima			Pusat												
	Standar Deviasi Realisasi terhadap Perencanaan-Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri	%	N/A		30	27	25	23	21							
	Indeks Kepuasan Layanan Biro Kerja Sama Luar Negeri	Skala Likert (1 - 4)	3.11		3.15	3.17	3.19	3.21	3.23							
Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian											1.327.448	1.367.074	1.407.883	1.450.098	1.493.720	Biro Keuangan dan Perlengkapan
	Terwujudnya Tata kelola Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian efektif, efisien dan akuntabel			pusat												
	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian	Opini	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang efektif, Efisien dan Akuntabel			pusat												
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal	Nilai	89,9		92,04	92,42	92,8	93,18	93,55							
Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian											20.040	20.638	21.254	21.891	22.550	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	Terwujudnya Tata Kelola Biro Organisasi dan Kepegawaian yang baik			pusat												
	Nilai Indeks Manajemen Perubahan	Nilai			70	78	82	86	92							
	Nilai Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai			73	76	79	85	92							
	Nilai Indeks Penataan Tata Laksana	Nilai			84	86	88	90	92							
	Nilai Indeks Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Nilai			85	87	89	91	92							
	Nilai Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai			88	89	90	91	92							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian	Terwujudnya Tata Kelola Biro Perencanaan yang Baik			pusat											Biro Perencanaan
	Standar devisi perencanaan terhadap realisasi kebijakan, program dan anggaran Pembangunan Pertanian	%			30	30	25	25	23						
	Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian	Nilai	3,00		3,06	3,09	3,11	3,14	3,17						
	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Perencanaan, Anggaran, Perwilayahan, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Siklus Perencanaan	Skala Likert (1-5)	3,11		3,17	3,2	3,23	3,26	3,29						
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pertanian untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	Nilai	74,05		74,1	74,3	73,5	74,7	74,9						
Peningkatan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian	Meningkatnya Kepuasan pengguna layanan, ketersediaan data pertanian serta pengelolaan TIK yang andal			Pusat						117.688	121.201	124.819	128.562	132.429	Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
	Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	Indeks			3,08	3,09	3,1	3,11	3,12						
	Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	%			90,28	90,94	91,94	91,94	91,94						
										40.146	41.345	42.579	43.855	45.175	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	Meningkatnya kualitas layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian			pusat											
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	skala likert (1 - 4)			3,3	3,33	3,37	3,4	3,43						
	Tingkat kepuasan unit kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	Skala Likert (1 - 4)			3,2	3,22	3,24	3,26	3,28						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Penelitian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian			Jawa Barat						34.637	35.671	36.735	37.837	38.975	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	%	N/A		85	88	90	92	93						
	Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian			Jawa Barat											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Skala Likert (1 - 4)	3,1		3,2	3,25	3,3	3,35	3,37						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian			Jawa Barat											
	Persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti	%			100	100	100	100	100						
	Persentase rekomendasi hasil audit atas implementasi SAKIP yang ditindaklanjuti (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)	%			100	100	100	100	100						
Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian	Terwujudnya Layanan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian yang Prima			Jawa Barat						29.524	30.406	31.313	32.252	33.222	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian	Skala Likert (1 - 4)			3,32	3,34	3,36	3,38	3,4						
	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian	Skala Likert (1 - 4)			2,84	2,86	2,88	3	3,02						
Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Keumahainggaan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa										187.854	193.461	199.236	205.210	211.384	Biro Umum dan Pengadaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya Pengelolaan Kearsipan secara elektronisasi yang terintegrasi dan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan serta Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			pusat											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Biro Umum dan Pengadaan	Skala Likert (1 - 4)			3	3,01	3,03	3,05	3,07						
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Informasi Publik, Hubungan Antar Lembaga, serta Keprotokolan di Bidang Pertanian										56.974	58.674	60.426	62.238	64.110	Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
	Terwujudnya layanan hubungan masyarakat, informasi publik dan keprotokolan yang prima.			pusat											
	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat, informasi publik, dan keprotokolan	Skala Likert (1 - 4)			3,33	3,33	3,34	3,34	3,35						
	Meningkatnya citra positif Kementerian Pertanian			pusat											
	Indeks pemberitaan positif terhadap total pemberitaan tentang Kementerian Pertanian	Skala Likert (1 - 4)			3,2	3,2	3,21	3,21	3,22						
	Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal			pusat											
	Indeks kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan Biro Humas dan Informasi Publik	Skala likert (1 - 4)			3,15	3,15	3,16	3,16	3,17						
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTAN										105.329	108.000	111.000	115.000	118.000	INSPEKTORAT JENDERAL
	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal														
	Level Internal Audit-Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian	Level	3		3	3	3	4	4						
	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian														
	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Nilai													
	1). Nilai Indeks Persepsi Korupsi				5,25	5,3	5,35	5,4	5,45						
	2). Nilai Penguatan Pengawasan Internal				10,15	10,25	10,35	10,4	10,45						
	3). Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP				6,8	6,9	7	7,1	7,2						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Rasio rekomendasi Kem PAN&RB yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi Kem PAN&RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	%			75	80	85	85	90						
	Meningkatnya Maturitas SPI Kementerian Pertanian														
	Nilai maturitas penyelenggaraan SPI Kementerian Pertanian	Nilai			3	3	3	4	4						
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian														
	Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	%			75	80	85	85	90						
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal														
	Rasio rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	%			75	80	85	85	90						
	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal														
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai			21,5	21,8	22,1	22,4	22,7						
	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal														
	Nilai kinerja (NK)	Nilai			80	82	84	86	88						
Pelaksanaan Pengawasan pada Saker Lingkup Sejen, Ditjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian										12.201	12.511	12.858	13.322	13.669	Inspektorat I
	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat I			Pusat											
	Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat I	Nilai			80	81	82	83	84						
	Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat I	%			75	80	85	85	90						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
	Rata-rata Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	Nilai			22,31	22,81	23,31	23,81	24,31						
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan mitra kerja Inspektorat I			Pusat											
	Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat I	%			75	80	85	85	90						
	Rasio rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	%			75	80	85	85	90						
	Meningkatnya Maturitas SPI di lingkungan mitra kerja Inspektorat I			Pusat											
	Rata-rata nilai maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat I	Nilai			3	3	3	4	4						
	Rasio rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat I	%			75	80	85	85	90						
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat I			Pusat											
	Rasio rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I	%			75	80	85	85	90						
Pelaksanaan Pengawasan pada Satter Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian										12.211	12.521	12.869	13.332	13.680	Inspektorat II
	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat II			Pusat											
	Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat II	Nilai			80	81	82	83	84						
	Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat II	%			75	80	85	85	90						
	Rata-rata Nilai Indeks Reformasi Birokrasi unit eselon I mitra kerja Inspektorat II	Nilai			22,2	22,7	23,2	23,7	24,2						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan mitra kerja Inspektorat II			Pusat											
	Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat II	%			75	80	85	85	90						
	Rasio rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat II yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat II	%			75	80	85	85	90						
	Meningkatnya Maturlitas SPI di lingkungan mitra kerja Inspektorat II			Pusat											
	Rata-rata nilai maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat II	Nilai			3	3	3	4	4						
	Rasio rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat II	%			75	80	85	85	90						
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat II			Pusat											
	Rasio rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat II	%			75	80	85	85	90						
Pelaksanaan Pengawasan pada Satter Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan															
	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat III			Pusat						12.003	12.307	12.649	13.105	13.447	Inspektorat III
	Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat III	Nilai			80	81	82	83	84						
	Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat III	%			75	80	85	85	90						
	Rata-rata Nilai Indeks Reformasi Birokrasi unit eselon I mitra kerja Inspektorat III	Nilai			21,47	21,97	22,47	22,97	23,47						
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan mitra kerja Inspektorat III			Pusat											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
	Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait pada eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat III	%			75	80	85	85	90						
	Rasio rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat III yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat III	%			75	80	85	85	90						
	Meningkatnya Maturlitas SPI di lingkungan mitra kerja Inspektorat III			Pusat											
	Rata-rata nilai maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat III	Nilai			3	3	3	4	4						
	Rasio rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat III	%			75	80	85	85	90						
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat III			Pusat											
	Rasio rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat III	%			75	80	85	85	90						
Pelaksanaan Pengawasan pada Sarker Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat IV			Pusat						12.139	12.447	12.792	13.253	13.599	Inspektorat IV
	Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV	Nilai			80	81	82	83	84						
	Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV	%			75	80	85	85	90						
	Rata-rata Nilai Indeks Reformasi Birokrasi unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV	Nilai			22.19	22.69	23.19	23.69	24.19						
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan keuangan di lingkungan mitra kerja Inspektorat IV			Pusat											
	Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait pada eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV	%			75	80	85	85	90						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
	Rasio rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektoral IV yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektoral IV	%			75	80	85	85	90						
	Meningkatnya Maturlitas SPI di lingkungan mitra kerja Inspektoral IV			Pusat											
	Rata-rata nilai maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektoral IV	Nilai			3	3	3	4	4						
	Rasio rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektoral IV	%			75	80	85	85	90						
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektoral IV			Pusat											
	Rasio rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektoral IV	%			75	80	85	85	90						
	Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada Satek Lingkup Kementerian Pertanian									10.351	10.613	10.908	11.301	11.596	Inspektoral Investigasi
	Dimanfaatkannya Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Pusat											
	Rasio rekomendasi Audit Tujuan Tertentu di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti	%			75	75	80	80	80						
	Rasio rekomendasi Audit Investigasi di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti	%			75	75	80	80	80						
	Meningkatnya Nilai Penguatan Pengawasan Internal			Pusat											
	Rasio Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM	%			20	25	30	35	40						
	Rasio Unit Kerja Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturlitas SPIP pada Level III dengan Nilai 3,5	%			45	55	65	75	85						
	Rasio Unit Kerja dengan Kapasitas Organisasi Lebih Besar Sama Dengan 5,5 dari Skala 6,00	%			30	35	40	45	50						
	Rasio Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Lebih Besar Sama Dengan 6 dari Skala 7,00	%			30	35	40	45	40						
	Rasio Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lebih Besar Sama Dengan 8,5 dari Skala 10	%			30	35	40	45	50						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal			Pusat							46.424	47.601	48.923	50.686	52.009	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	Level Internal Audit-Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian	Level			3	3	3	4	4							
	Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal			Pusat												
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Pertanian	Indeks			21,5	21,8	22,1	22,4	22,7							
	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal			Pusat												
	Nilai AKIP Inspektorat Jenderal Pertanian	Nilai			80	82	83	84	85							
	Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal	%			75	80	85	85	90							
	Nilai kinerja (NK) Inspektorat Jenderal	Nilai			80	82	84	86	88							
	Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait ttjen yang ditindaklanjuti ttjen	%			75	80	85	85	90							
	Rasio rekomendasi Revisi Laporan Keuangan Inspektorat IV atas Laporan Keuangan ttjen yang ditindaklanjuti ttjen	%			75	80	85	85	90							
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN	Rasio rekomendasi Audit Inspektorat IV yang ditindaklanjuti ttjen	%			75	80	85	85	90							
	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat ttjen			Pusat												
	Tingkat kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Sekretariat ttjen (Survei Internal)	Skala Likert (1-4)			3,1	3,15	3,2	3,2	3,25							
										5.612.809	5.781.000	5.954.000	6.133.000	6.317.000	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Tanaman Pangan Dalam Negeri															Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
	Peningkatan Produksi Padi	%			8,32	5,67	7,2	6,72	3,5							Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
	Peningkatan Produksi Jagung	%			24,6	3,24	3,45	3,33	3,52							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Peningkatan Produksi Kedelai	%			13,16	7,08	7	7,09	6,96						Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian tanaman pangan														
	- Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian tanaman pangan	%			10	11	12	13	14						Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
	Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan yang sesuai dengan kebutuhan														
	Rasio ketersediaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen Tanaman Pangan berdasarkan kebutuhan	%			51	52	53	54	55						Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman pangan														
	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan	%			5	5	5	5	5						Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Tanaman Pangan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima														
	Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Tanaman Pangan (PMPPRB)	Nilai	22,05		22,47	22,68	22,89	23,1	23,31						Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Ditjen TP	Skala likert			3,4	3,43	3,45	3,48	3,5						Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
	Terkolarnya Anggaran Ditjen Tanaman Pangan yang Akuntabel														
	Nilai Kinerja (NK)	Nilai	80,39		74,25	74,5	75	75,5	76						Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi										732.604	754.557	777.137	800.501	824.517	Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
	Meningkatnya produksi kedelai			Pusat											
	Jumlah Produksi Kedelai	Juta Ton			0,48	0,51	0,55	0,59	0,63						
	Terpenuhinya kebutuhan komoditas aneka kacang dan umbi tanaman pangan untuk komoditas ekspor			Pusat											
	Jumlah Produksi aneka Kacang	Juta Ton			0,63	0,67	0,71	0,77	0,81						
	Jumlah Produksi umbi-umbian	Juta Ton			24,3	24,6	24,9	25,2	25,5						
Pengelolaan Produksi Sereal										1.361.089	1.401.874	1.443.826	1.487.233	1.531.853	Direktorat Sereal
	Meningkatnya produksi padi dan jagung			Pusat											



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Produksi Padi	Juta Ton	54,6		59,15	62,5	67	71,5	74						
	Produksi Beras Biofortifikasi	Ha	195		10.000	50.000	100.000	150.000	200.000						
	Produksi Jagung	Juta Ton	22,5		30,9	31,9	33	34,1	35,3						
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan										1.976.344	2.035.566	2.096.482	2.159.510	2.224.299	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan tanaman pangan untuk produksi pangan strategis tanaman pangan			Pusat											
	Rasio benih padi bersertifikat yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%	53		60	65	70	75	80						
	Rasio benih jagung yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%			80	81	82	83	84						
	Rasio benih kedelai yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%			37	38	39	40	41						
	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan tanaman pangan untuk komoditas ekspor			Pusat											
	Rasio benih ubi jalar yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%			6	6	6	6	6						
	Rasio benih kacang tanah yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%			11	11	11	11	11						
	Rasio benih ubi kayu yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%			6	6	6	6	6						
	Rasio benih kacang hijau yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%			11	11	11	11	11						
	Rasio benih porang yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%			6	6	6	6	6						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Meningkatnya penanganan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan			Pusat						390.120	401.810	413.835	426.276	439.065	Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
	Rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam tanaman pangan	%			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
	Rasio luas Terkena DPI terhadap luas tanam tanaman pangan	%			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Tanaman Pangan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima			Pusat						404.385	416.502	428.967	441.863	455.120	Sekretariat Direktorat Jenderal
	Nilai AKIP Ditjen TP berdasarkan penilaian Inspektoral Jenderal Kementerian Pertanian	Nilai			85,5	86	86,5	87	87,5						
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Skala Likert			3,19	3,2	3,23	3,25	3,28						
	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang Akuntabel dan Berkualitas			Pusat											
	Nilai Kinerja (NK) Berdasarkan PMK	Nilai	80,39		74,25	74,5	75	75,5	76						
	Rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya	%			30	25	20	15	10						
	Rasio temuan Inspektoral Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkungan Ditjen TP yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan pada tahun sebelumnya				30	25	20	15	10						
Pembangunan Perumahan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan										34.750	35.791	36.862	37.971	39.110	BBPOPT
	Meningkatnya kualitas layanan publik BBPOPT			Jawa Barat											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPOPT	Skala Likert (1 - 4)			3,5	3,52	3,5	3,5	3,5						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya implementasi rekomendasi peramalan serangan OPT yang diberikan oleh BBPOPT														
	Rasio luas serangan OPT tanaman padi yang terjadi terhadap luas serangan OPT yg diramalkan	%			72,5	72	71,5	71	70,5						
	Rasio luas serangan OPT tanaman jagung yang terjadi terhadap luas serangan OPT yg diramalkan	%			70	70	69	69	68						
	Rasio luas serangan OPT tanaman kedelai yang terjadi terhadap luas serangan OPT yg diramalkan	%			21	21	20	20	19,5						
	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPOPT yang terjadi berulang	Jumlah			0	0	0	0	0						
	Jumlah temuan ttjen atas Implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)	Jumlah			0	0	0	0	0						
	Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih Dan Penerapan Sistem Mutu Benih Dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih									14.300	14.729	15.169	15.625	16.094	BBPPMBTPH
	Meningkatnya kualitas layanan publik Pengembangan dan Pengujian Mutu Benih			Jawa Barat											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPPMBTPH	Skala Likert			3,3	3,35	3,4	3,45	3,5						
	Meningkatnya pemanfaatan metode pengujian mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura			Jawa Barat											
	Rasio metode pegujian mutu benih yang dimanfaatkan *penguna dibanding total metode pengujian mutu benih yang dihasilkan (*laboratorium penguji benih BPSB/ produsen benih)	%			100	100	100	100	100						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BBPPMBTPH			Jawa Barat											
	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPPMBTPH yang terjadi berulang	Temuan			0	0	0	0	0						
	Jumlah temuan ttjen atas Implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)	Temuan			0	0	0	0	0						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan untuk komoditas ekspor			Pusat							699.218	720.170	741.722	764.021	786.943	Direktorat PPHTP
	Rasio Peningkatan kualitas komoditas tanaman pangan untuk mendukung ekspor	%			4	3	2	1	0							
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan			Pusat												
	Rasio pengujian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen Tanaman Pangan yang dapat dipenuhi terhadap seluruh permintaan yang masuk	%			51	52	53	54	55							
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA										574.146	999.588	1.037.500	1.058.250	1.089.998	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri															
	Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis (%)	%			0,4	0,4	0,4	0,5	0,5							
	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura Nasional															
	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk hortikultura nasional (%)	%			6	-	-	-	-							
	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%			1,45	1,51	1,56	1,63	1,55							
	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan															
	Rasio ketersediaan sarana perbenihan hortikultura terhadap kebutuhan	%			42	42	42	42	42							
	Tekendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura															
	Rasio serangan OPT terhadap luas tanam tanaman hortikultura	%			≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5							
	Rasio luas penanganan DPI terhadap luas yang terkena DPI tanaman hortikultura	%			≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1							
	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima															

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura (PMPRB)	Nilai	22.04		22.04	22.46	22.67	22.88	23.09						
	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas														
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	80.27		80.05	81	81,5	82	83						
Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat										189.200	475.175	487.500	497.250	512.168	Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
	Meningkatnya produksi komoditas strategis hortikultura			Pusat											
	Peningkatan produksi sayuran	%	2,5		2,6	2,7	2,9	3	3,1						
	Produksi cabai yang difasilitasi	Ton			40.000	40.000	40.000	50.000	70.000						
	Produksi Bawang merah yang difasilitasi	Ton			25.000	25.000	25.000	25.000	30.000						
	Produksi Bawang Putih yang difasilitasi	Ton			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000						
	Meningkatnya produksi hortikultura unggulan yang difasilitasi			Pusat											
	Produksi sayuran dan tanaman obat yang difasilitasi	Ton	sayuran lainnya, tan. Obat		3.250	3.250	3.250	3.250	3.250						
Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura										103.366	86.666	90.000	91.800	94.554	Direktorat Perbenihan Hortikultura
	Tersedianya sarana perbenihan hortikultura beemutu terhadap kebutuhan			Pusat											
	- Produksi benih umbi yang difasilitasi (Ton)	ton			240	240	400	600	800						
	- Produksi benih batang yang difasilitasi (Batang)	batang			1.623.000	1.650.000	2.000.000	3.500.000	4.800.000						
	- Sertifikasi benih hortikultura (unit)	unit			1.000	1.000	1.500	2.500	4.000						
	- Prasarana dan Sarana perbenihan hortikultura yang difasilitasi (unit)	unit			9	9	9	15	25						
Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura										33.592	55.255	67.000	68.340	70.390	Direktorat Perlindungan Hortikultura
	Pengendalian serangan OPT terhadap luas tanam hortikultura			Pusat											
	Rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam hortikultura	%			≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5						
	Penanganan area yang terkena DPI terhadap area yang terkena DPI			Pusat											



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	%			≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1						
Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura															
	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif dan efisien			Pusat											
	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura (PMRPB)	Nilai	22,04		22,04	22,46	22,67	22,88	23,09						
	Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas			Pusat											
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	80,27		80,5	81	81,5	82	83						
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura														
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	Skala Likert		Pusat	3,13	3,15	3,17	3,19	3,21						
Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura															
	Meningkatnya produksi hortikultura unggulan yang difasilitasi			Pusat						33.440	150.400	155.000	158.100	162.843	Direktorat Buah dan Florikultura
	Peningkatan produksi buah-buahan	%	3,5		3,9	4,3	4,7	5,2	5,7						
	Peningkatan produksi florikultura	%	5		5,1	5,2	5,3	5,4	5,5						
	Produksi buah yang difasilitasi	Ton	jeruk, mangga, manggis, pisang, durian, buah lainnya		15.712	16.000	25.000	40.000	70.000						
	Produksi florikultura tangkai yang difasilitasi	Tangkai	Krisan, Anggrek, Mawar		400.000	420.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000						
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura															
	Meningkatnya nilai tambah dan akses pasar komoditas hortikultura			Pusat						73.243	78.400	80.000	81.600	84.048	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
	Peningkatan fasilitas akses pasar hortikultura	%			10	10	10	10	10						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
	Peningkatan fasilitas nilai tambah produk hortikultura	%			35	40	45	50	55						
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN															
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian perkebunan														
	Nilai Impor untuk Produk Perkebunan	Milyar USD			5	4	3	3	2						
	Nilai Ekspor untuk Produk Perkebunan	Milyar USD			25	25	26	27	27						
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Perkebunan yang Sesuai Kebutuhan														
	Indeks Ketersediaan Sarana Perkebunan yang Sesuai Peruntukkan	%			4	5	5	6	7						
	Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan														
	Rasio Serangan OPT dan DPI yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT dan DPI Tanaman Perkebunan	%			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5						
	Biokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien														
	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan (PMPRB)	Nilai RB	22,15		22,57	22,78	23	23,21	23,42						
	Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas														
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai IKPA	84,45		86,46	86,82	87,17	87,53	87,88						
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan														
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan	Skala Likert (1-4)			3	3	3	3	3						
Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar										437.460	450.415	463.890	477.939	492.274	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar
	Meningkatnya produksi tanaman substitusi impor dari tanaman tahunan dan penyegar			Pusat											
	Produksi kemiri sunan	Ton	3.00		3.15	3.16	3.17	3.17	3.18						
	Produksi sagu	Ton	478.561		480.954	483.359	485.775	488.204	490.645						



Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
	Meningkatnya produksi tanaman ekspor dari tanaman tahunan dan penyegar			Pusat											
	Produksi jambu mete	Ton	136.402		136.402	136.402	163.902	191.402	218.909						
	Peningkatan Produksi kakao	%	1,7		2,1	2,3	2,5	2,6	2,7						
	Produksi karet	Ton	3.448.700		3.630.357	3.630.357	4.130.357	4.630.357	5.130.357						
	Produksi kelapa	Ton	2.922.190		2.951.412	2.980.926	3.010.735	3.040.843	3.071.251						
	Peningkatan Produksi kopi	%	1,4		1,4	1,5	1,5	1,5	1,5						
	Produksi teh	Ton	141.252		141.843	150.354	157.872	164.186	169.112						
	Produksi gula aren	Ton	70.083		70.433	70.786	71.140	71.495	71.853						
	Peningkatan produksi kelapa sawit	persen	5,7		5,8	5,9	5,9	6	6	255.176	262.733	270.593	278.788	287.150	Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah
Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah															
	Meningkatnya produksi tanaman substitusi impor dari tanaman semusim dan rempah			Pusat											
	Produksi tebu	Ton	28.298.762		31.161.474	34.312.735	37.798.717	41.558.678	45.736.111						
	Produksi tembakau	Ton	182.661		239.743	303.514	375.346	456.849	547.363						
	Produksi kapas	Ton			360	450	500	550	600						
	Meningkatnya produksi tanaman ekspor dari tanaman semusim dan rempah			Pusat											
	Produksi cengkeh	Ton	123.766		131.679	140.152	148.911	157.965	167.322						
	Produksi lada	Ton	89.671		94.523	103.384	115.067	125.379	143.616						
	Produksi nilam	Ton	442,2		486.420	535.062	588.568	647.425	712.168						
	Produksi pala	Ton	37.496		39.420	47.304	58.751	68.969	80.445						
	Produksi serih wangi	Ton	250.833		275.917	303.508	333.859	367.245	403.970						
	Produksi vanili	Ton	12.749		12.749	15.441	18.296	21.312	24.490						
	Produksi gambir	Ton	18.322		35.925	54.399	73.038	91.928	111.072	58.539	60.273	62.076	63.956	65.874	Direktorat Perlindungan Perkebunan
Dukungan Perlindungan Perkebunan															
	Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan			Pusat											
	Rasio Serangan OPT dan DPI yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	%	1,6		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Perlindungan Perkebunan			Pusat											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik perlindungan perkebunan	Skala Likert (1 - 4)			3	3	3	3	3						
Dukungan Perbenihan Perkebunan										259.544	267.229	275.224	283.559	292.064	Direktorat Perbenihan Perkebunan
	Tersedianya benih tanaman substitusi impor			Pusat											
	Jumlah benih tebu yang dihasilkan	Mata			247.200.000	4.188.286.500	4.455.831.150	4.747.130.265	5.064.559.292						
	Jumlah benih tembakau yang dihasilkan	Gram			3.596.138	3.793.926	4.021.562	4.282.963	4.561.356						
	Jumlah benih kapas yang dihasilkan	Kilogram			5.400	6.000	6.000	6.000	6.000						
	Jumlah benih kemiri sunan yang dihasilkan	Batang			12.000	12.000	12.000	12.000	18.000						
	Jumlah benih sagu yang dihasilkan	Batang			24.000	24.000	24.000	24.000	24.000						
	Tersedianya benih tanaman ekspor			Pusat											
	Jumlah benih kopi yang dihasilkan	Batang			10.333.444	7.926.112	7.108.975	7.165.844	7.223.168						
	Jumlah benih kelapa sawit yang dihasilkan	Butir			5.357.309	5.370.703	5.384.129	5.397.590	5.411.084						
	Jumlah benih karet yang dihasilkan	Batang			7.500.000	8.500.000	8.500.000	9.000.000	10.000.000						
	Jumlah benih lada yang dihasilkan	Batang			86.645.680	90.977.920	95.527.080	100.303.280	105.318.400						
	Jumlah benih pala yang dihasilkan	Batang			4.817.956	5.203.396	5.619.658	6.069.250	6.554.768						
Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan										120.906	124.486	128.210	132.093	136.055	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan			Pusat											
	Nilai impor untuk produk perkebunan	Milyar USD			5	4	3	3	2						
	Nilai ekspor untuk produk perkebunan	Milyar USD			25	25	26	27	27						
	Penyediaan Sarana Perkebunan yang Sesuai Kebutuhan			Pusat											
	Indeks Ketersediaan Sarana Perkebunan yang Sesuai Peruntukkan	%			4	5	5	6	7						
Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen. Perkebunan										255.129	262.684	270.543	278.736	287.097	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
	Biokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien			Pusat											



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan (PMPRB)	Nilai RB	22,15		22,57	22,78	23	23,21	23,42						
	Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	Skala Likert (1 – 4)			3	3	3	3	3						
	Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas			Pusat											
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai IKPA (1 – 100)	84,45		86,46	86,82	87,17	87,53	87,88						
Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (Kegiatan di 4 UPT Pusat)										139.062	143.180	147.463	151.929	156.486	UPT Pusat/Balai
	Meningkatnya kualitas layanan publik			Daerah											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	Skala likert (1 - 4)			3	3	3	3	3						
PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT										2.116.609	2.365.315	2.586.088	2.842.812	3.115.587	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak														
	Produksi daging	Ribu Ton			4.714,88	4.939,55	5.177,04	5.439,29	5.786,62						
	Produksi susu	Ribu Ton			1.041,31	1.088,20	1.137,20	1.188,41	1.241,93						
	Produksi telur	Ribu Ton			5.470,94	5.588,88	5.709,57	5.833,06	5.959,43						
	Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan														
	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan	%			25	33,75	47,25	68,51	137,03						Ditjen PKH, Dit. PPHNak, Dit. Bitpro, Dit. Pakan, Dit. Kesmavet, Dit. Keswan
	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak														
	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%			81,5	82	82,5	83	83,5						Ditjen PKH, Dit. Bitpro, Dit. Pakan, Dit. Kesmavet, Dit. Keswan
	Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan														
	Indeks ketersediaan sarana peternakan yang sesuai peruntukan	Indeks	15,7		17,7	20,9	25,4	31,2	38,4						Ditjen PKH, Dit. PPHNak, Dit. Kesmavet



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis														
	Rasio wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	80		80	80,5	80,5	81	81						Ditjen PKH, Dit. Keswan
	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia														
	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	%	125		127	125	123	121	119						
	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima														
	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	22,01		22,43	22,64	22,85	23,06	23,27						
	Tingkat kepuasan layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala Likert (1 - 4)			3,57	3,58	3,59	3,59	3,6						
	Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas														
	Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	87,82		88,25	88,68	88,93	90,32	90,85						Ditjen PKH, Dit. Kesmavet
Peningkatan Produksi Pakan Ternak										104.286	144.402	150.682	163.234	178.128	Direktorat Pakan
	Terpenuhi nya pakan ternak sesuai kebutuhan			Pusat											
	Jumlah pakan ternak sapi untuk produksi	Ton			28.107.952	28.969.789	29.857.247	30.772.180	31.740.416						
	Jumlah pakan ternak kambing untuk produksi	Ton			1.900.856	1.879.107	1.857.358	1.837.784	1.816.035						
	Jumlah pakan ternak kambing dan domba untuk produksi	Ton			6.732.648	6.820.712	6.910.611	7.001.983	7.095.191						
	Jumlah pakan ternak ayam ras pedaging untuk produksi	Ton			11.681.671	12.440.667	13.248.976	14.109.804	15.026.565						
	Jumlah pakan ternak ayam lokal untuk produksi	Ton			1.859.579	1.907.002	1.955.635	2.005.502	2.056.650						
	Jumlah pakan ternak itik untuk produksi	Ton			1.347.596	1.389.613	1.432.991	1.477.818	1.524.112						
	Jumlah pakan ternak babi untuk produksi	Ton			117.053	147.053	187.053	227.053	267.053						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terpenuhiya pakan ternak perah sesuai kebutuhan			Pusat											
	Jumlah pakan ternak perah untuk produksi susu (sapi, kerbau, kambing)	Ton			19.758.756	19.808.756	19.858.756	19.908.756	19.958.756						
	Terpenuhiya pakan untuk ayam petelur sesuai dengan kebutuhan			Pusat											
	Jumlah pakan ternak untuk ayam petelur	Ton			1.162.716	1.212.716	1.262.716	1.312.716	1.362.716						
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan										273.759	314.822	362.046	416.352	478.805	Direktorat Kesehatan Hewan
	Meningkatnya mutu, keamanan, dan kesehatan hewan komoditas peternakan dan kesehatan hewan			Pusat											
	Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor ternak per negara tujuan (alasan penolakan : kesehatan hewan)	%			0	0	0	0	0						
	Rasio ekspor non ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor non ternak per negara tujuan (alasan penolakan : kesehatan hewan)	%			0	0	0	0	0						
	Rasio ekspor obat hewan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan terhadap total ekspor obat hewan per negara tujuan (alasan penolakan : mutu dan keamanan)	%			0	0	0	0	0						
	Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis			Pusat											
	Rasio ternak sapi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi	%	2		4	4	3	3	2						
	Rasio ternak kerbau yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kerbau	%			4	4	3	3	2						
	Rasio ternak kambing yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kambing	%			4	4	3	3	2						
	Rasio ternak domba yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak domba	%			4	4	3	3	2						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
	Rasio ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam	%			4	4	3	3	2						
	Rasio ternak tik yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak tik	%			4	4	3	3	2						
	Rasio ternak babi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak babi	%			4	4	3	3	2						
	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis			Pusat											
	Rasio wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	80		80	80,5	80,5	81	81						
	Meningkatnya kesehatan ternak perah			Pusat											
	Rasio ternak perah yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak perah	%			4	4	3	3	2						
	Meningkatnya kesehatan ayam petelur			Pusat											
	Rasio ayam petelur yang mati karena penyakit terhadap total populasi ayam petelur	%			4	4	3	3	2						
Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak										1.231.186	1.358.053	1.501.005	1.674.350	1.851.718	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
	Meningkatnya mutu produk peternakan untuk komoditas ekspor			Pusat											
	Rasio Ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan (alasan penolakan : mutu ternak)	%			20	20	15	15	15						
	Terpenuhiya populasi ternak sesuai kebutuhan			Pusat											
	Jumlah populasi ternak sapi potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor			3.484.320	3.592.674	3.701.028	3.809.382	3.917.736						
	Jumlah populasi ternak kerbau potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor			148.056	152.660	157.264	161.868	166.472						
	Jumlah populasi ternak kambing potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor			6.959.631	7.176.059	7.392.486	7.608.914	7.825.341						
	Jumlah populasi ternak domba potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor			9.024.344	9.304.979	9.585.614	9.866.249	10.146.884						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023
	Jumlah populasi ternak ayam sesuai kebutuhan produksi	Ekor			267.935.428	267.935.428	267.935.428	267.935.428	267.935.428					
	Jumlah populasi ternak itik sesuai kebutuhan produksi	Ekor			30.770.385	31.727.269	32.684.153	33.641.037	34.597.921					
	Jumlah populasi ternak babi potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor			4.028.023	4.153.285	4.278.547	4.403.809	4.529.070					
	Terpenuhiya bibit ternak sesuai kebutuhan		Pusat											
	Jumlah bibit ternak sapi potong yang diajukan	Ekor			5.263.985	5.395.584	5.530.474	5.668.736	5.810.454					
	Jumlah bibit ternak kerbau potong yang diajukan	Ekor			344.957	347.545	350.151	352.777	355.423					
	Jumlah bibit ternak kambing potong yang diajukan	Ekor			5.716.524	5.740.361	5.764.297	5.788.333	5.812.470					
	Jumlah bibit ternak domba potong yang diajukan	Ekor			5.455.320	5.574.902	5.697.105	5.821.987	5.949.606					
	Jumlah bibit ternak ayam yang diajukan	Ekor			17.350.891	17.890.461	18.430.031	18.969.602	19.509.172					
	Jumlah bibit ternak itik yang diajukan	Ekor			190.883	196.819	202.755	208.691	214.627					
	Jumlah bibit ternak babi potong yang diajukan	Ekor			802.449	827.404	852.358	877.312	902.266					
	Tersedianya standar benih dan bibit ternak sesuai kebutuhan		Pusat											
	Rasio standar benih ternak yang dihasilkan terhadap total standar benih ternak yang direncanakan	%			90	90	90	90	90					
	Rasio standar bibit ternak yang dihasilkan terhadap total standar bibit ternak yang direncanakan	%			90	90	90	90	90					
	Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit bermutu		Pusat											
	Rasio benih dan bibit yang bersertifikat terhadap total benih dan bibit yang diajukan	%			70	75	80	85	90					
	Meningkatnya produksi susu untuk memenuhi kebutuhan protein nasional		Pusat											
	Produksi Susu	Ton			1.041.310	1.086.200	1.137.200	1.188.410	1.241.930					
	Jumlah Populasi ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu	Ekor			586.000	614.000	645.000	681.000	721.000					
	Meningkatnya produksi telur untuk memenuhi kebutuhan protein nasional		Pusat											
	Produksi Telur	Ton			4.795.165	4.896.101	4.996.643	5.096.696	5.198.982					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
	Jumlah populasi ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur	Ekor			267.935.428	273.552.827	279.170.226	284.760.370	290.475.270						
Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)										49.619	73.177	85.042	87.858	90.761	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Meningkatnya produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan ekspor terkait alasan mutu dan keamanan produk			Pusat											
	Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan (alasan penolakan: mutu dan keamanan produk)	%			0	0	0	0	0						
	Meningkatnya daging yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat			Pusat											
	Rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong	%	15,7		17,5	20,2	23,8	28,3	33,7						
	Rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong	%			48,3	55,8	59,5	65,1	68,8						
	Rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong	%	1,7		6,7	11,7	16,7	21,7	26,7						
	Tersedianya sarana pasca panen peternakan sesuai peruntukkan			Pusat											
	Indeks ketersediaan sarana pasca panen peternakan yang memenuhi persyaratan	%	15,7		17,7	20,9	25,4	31,2	38,4						
	Terjaminnya keamanan pangan strategis nasional			Pusat											
	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%			81,5	82	82,5	83	83,5						
	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia			Pusat											
	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi/penularan kepada manusia	Kasus	128		127	125	123	121	119						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya produk susu dan telur yang berstatus sehat untuk dikonsumsi masyarakat			Pusat											
	Rasio produk susu yang berstatus sehat terhadap total produk susu yang dihasilkan	%	88		88,2	88,5	89	89,2	89,5						
	Rasio produk telur yang berstatus sehat terhadap total produk telur yang dihasilkan	%	95		95,2	95,5	95,7	96	96,2						
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak															Direktorat Pengolahan Hasil Peternakan
	Meningkatnya daya saing komoditas hasil peternakan			Pusat											
	Jumlah ekspor hewan hidup	Ton	22.885		25.631	30.757	41.523	60.208	79.474						
	Jumlah ekspor produk pangan segar dan olahan	Ton	107.722		120.649	144.778	195.451	283.404	374.093						
	Jumlah ekspor produk non pangan	Ton	57.589		64.500	77.400	104.489	151.510	199.993						
	Jumlah ekspor obat hewan	Ton	616		690	828	1.118	1.621	2.139						
	Jumlah ekspor benih dan bibit ternak	Ton	147		165	198	267	387	510						
	Pertumbuhan unit usaha peternakan	%	1,49		1,88	2,59	3,64	4,26	5,14						
	Tersedianya sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan			Pusat											
	Indeks ketersediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang sesuai peruntukkan	%	5,6		6,68	8,25	9,81	11,38	12,94						
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan										422.810	428.321	433.969	439.759	445.694	Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima			Pusat											
	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	22,01		22,43	22,64	22,85	23,06	23,27						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala Likert (1 - 4)	3,4		3,57	3,74	3,92	4	4						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
	Terkelolanya Anggaran Ditjen Pemerintahan dan Kesehatan Hewan yang Akutabel dan Berkualitas			Pusat											
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK yang berlaku)	Nilai			92,86	93,24	93,62	94,01	94,38						
Penyediaan benih dan bibit ternak															
	Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBIP Singosari			Jawa Timur											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBIB Singosari (1-4)	Skala Likert			3,3	3,3	3,3	3,3	3,3						
	Meningkatnya pendapatan BLU BBIB Singosari			Jawa Timur											
	Jumlah penerimaan BLU BBIB Singosari	Juta Rupiah			24.000	26.000	26.500	27.000	27.500						
	Meningkatnya produksi Semen Beku			Jawa Timur											
	Produksi semen beku APBN/BLU	Dosis			3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.325.000	3.500.000	3.253.898	3.731.490	3.843.435	3.958.738	4.077.500	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN															
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan														
	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	%			62,55	63,1	63,56	64,05	64,55						
	Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	%			77,92	77,92	77,92	77,92	77,92						
	Biokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif dan Efisien														
	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	22,35		22,44	22,54	22,64	22,74	22,84						
	Tingkat kepuasan Unit Eselon I teknis di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan	Nilai			3,3	3,3	3,34	3,35	3,5						
	Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akutabel dan Berkualitas														
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai			81	82	83	84	85						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian				Pusat						543.398	634.353	653.384	672.985	693.175	Direktorat Irigasi Pertanian
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian														
	Indeks pemenuhan lahan pertanian yang mendapat pengairan	%			31,68	34,45	37,22	39,99	42,76						
Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian										800.233	932.873	960.859	989.684	1.019.375	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
	Tersedianya lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan			Pusat											
	Indeks ketersediaan lahan pertanian	%			66,53	65,84	64,79	63,88	63,03						
	Indeks keberlanjutan lahan pertanian	%			99,8	99,84	99,89	99,93	99,96						
	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	%	50		50	65	80	90	100						
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian										993.853	1.156.762	1.191.465	1.227.209	1.264.025	Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
	Meratanya pemanfaatan alsintan di wilayah pertanian sesuai kebutuhan peningkatan produktivitas pangan strategis nasional			Pusat											
	Indeks pemanfaatan alsintan	%			80	80	80	80	80						
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian										400.841	447.779	461.212	475.049	489.300	Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
	Terwujudnya brokrasi yang profesional dan berorientasi pelayanan di lingkungan Ditjen PSP			Pusat											
	Nilai reformasi brokrasi Ditjen PSP berdasarkan penilaian auditor kinerja (Menpan RB / Itjen)	Nilai	22,35		22,44	22,54	22,64	22,74	22,84						
	Tingkat kepuasan unit Eselon I teknis di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan	Nilai			3,3	3,3	3,34	3,35	3,5						
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian				81	82	83	84	85						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Fasilitas Pupuk dan Pestisida															Direktorat Pupuk dan Pestisida
	Optimalnya distribusi pupuk dan pestisida dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional			Pusat											
	Indeks distribusi pupuk dan pestisida di seluruh lahan pertanian	%			75,84	75,84	75,84	75,84	75,84						
Fasilitas Pembiayaan Pertanian										239.014	261.204	269.040	277.112	285.425	Direktorat Pembiayaan Pertanian
	Meningkatnya akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian			Pusat											
	Indeks aksesibilitas petani terhadap pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	%			52,18	52,26	52,33	52,39	52,45						
PROGRAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN INOVASI PERTANIAN BIO-INDUSTRI BERKELANJUTAN										1.800.970	1.908.110	1.999.441	2.092.860	2.186.076	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (BALITBANGTAN)
	Temanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian														
	Rasio hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (didiseminasikan) terhadap hasil penelitian dan pengembangan (kumulatif 5 tahun terakhir) (%)	%			65	70	70	75	75						Seluruh Eselon II Lingkup Balitbangtan
	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2,5.1*)	VUB dan galur		Pusat	30 dan 8	30 dan 8	30 dan 8	30 dan 8	30 dan 8						
	Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2,5.2*)	Aksesi		Pusat	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250						
	Terselenggaranya Biokrasi Balitbangtan yang Efektif dan Efisien														
	Nilai Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Balitbangtan (Nilai)	Nilai	20,16		20,16	20,18	20,2	20,24	20,3						Seluruh Eselon II Lingkup Balitbangtan
	Terkelolanya Anggaran Balitbangtan yang Akuntabel dan Berkualitas														
	Nilai Kinerja Balitbangtan (berdasarkan regulasi PMK yang berlaku) (Nilai)	Nilai	94,96		92	92,58	92,75	93	93,25						Seluruh Eselon II Lingkup Balitbangtan
Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian										11.642	12.224	12.835	13.477	14.151	Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (BB BIOGEN)



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian			Jawa Barat											
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir)	Jumlah			24	30	35	35	35						
	Rasio hasil litbang (output akhir) Sumberdaya genetik pertanian terhadap seluruh output hasil litbang subdaya genetik pertanian yang dilaksanakan pada tahun berjalan	%			100	100	100	100	100						
	Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima			Jawa Barat											
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	Nilai			82,5	83	83	84	84						
	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas			Jawa Barat											
	Nilai Kinerja Balai Besar penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku)	Nilai			85,0	85,5	86,0	86,5	87,0						
Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen										39.250	41.210	43.270	45.440	47.700	Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian (BB Pasca Panen)
	Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pascapanen Pertanian			Jawa Barat											
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pasca panen pertanian yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir)	Jumlah			66	72	79	83	88						
	Rasio hasil litbang (output akhir) pasca panen pertanian terhadap seluruh output hasil litbang pasca panen pertanian yang dilaksanakan pada tahun berjalan	%			100	100	100	100	100						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima			Jawa Barat											
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian	Nilai			80	80	81	81	82						
	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas			Jawa Barat											
	Nilai Kinerja Balai Besar penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	Nilai			84	84,5	85	85,5	86						
Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya lahan Pertanian										56.537	56.760	57.015	57.255	57.605	Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP)
	Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Sumberdaya Lahan Pertanian			Jawa Barat											
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Sumberdaya lahan Pertanian yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) (Jumlah)	Jumlah			570	575	584	590	595						
	Rasio hasil litbang (output akhir) Sumberdaya lahan Pertanian terhadap seluruh output hasil litbang Sumberdaya lahan Pertanian yang dilaksanakan pada tahun berjalan	%			90	90	90	90	90						
	Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima			Jawa Barat											
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	Nilai			79,5	80	80,5	81	81,5						
	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas			Jawa Barat											



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Nilai Kinerja Balai Besar penelitian dan Pengembangan Sumberdaya lahan Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku)	Nilai			85,6	86	86,5	87	87,5						
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian										354.015	372.946	391.035	409.802	430.291	Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)
	Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi			Jawa Barat											
	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir)	Jumlah			564	636	704	772	840						
	Rasio hasil pengkajian (output akhir) Spesifik Lokasi terhadap seluruh output hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	%			95	95	96	96	96						
	Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima			Jawa Barat											
	Nilai Pembangunan zona integras (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Nilai			79	79	80	80	81						
	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas			Jawa Barat											
	Nilai Kinerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku)	Nilai			90	90,5	91	91,5	92						
Penelitian/Perkayasaan dan Pengembangan Teknologi Pertanian										10.829	13.959	15.419	17.129	18.239	Balai Besar Mekanisasi Pertanian (BB MEKTAN)
	Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Mekanisasi Pertanian			Jawa Barat											
	Jumlah hasil Perkayasaan/ penelitian dan pengembangan mekanisasi Pertanian yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir)	Jumlah			20	20	20	20	20						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Rasio hasil Perekayasan/ penelitian dan pengembangan mekanisasi Pertanian terhadap seluruh output hasil Perekayasan/penelitian dan pengembangan mekanisasi Pertanian yang dilaksanakan pada tahun berjalan	%				100	100	100	100	100					
	Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima			Jawa Barat											
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Nilai			80	81	82	83	84						
	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas			Jawa Barat											
	Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku)	Nilai			94	94	95	95	96						
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura										37.499	37.740	40.085	40.320	36.880	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura (PUSLITBANGHORTI)
	Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Hortikultura			Jawa Barat											
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Hortikultura yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir)	Jumlah			182	172	136	125	80						
	Rasio hasil Penelitian dan pengembangan Hortikultura terhadap seluruh output hasil penelitian dan pengembangan Hortikultura yang dilaksanakan pada tahun berjalan	%			45	45	47	51	66						
	Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima			Jawa Barat											
	Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura	Nilai			83	84	85	86	87						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas			Jawa Barat											
	Nilai Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura (berdasarkan PMK yang berlaku)	Nilai			92	93	94	95	96						
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan															
	Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Perkebunan			Jawa Barat						56.293	61.951	67.200	72.500	77.250	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (PUSLITBANGBUN)
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Perkebunan yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir)	Jumlah			56	57	58	58	59						
	Rasio hasil Penelitian dan pengembangan Perkebunan terhadap seluruh output hasil penelitian dan pengembangan Perkebunan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	%			60	62	65	70	75						
	Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima			Jawa Barat											
	Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	Nilai			85	85	85	86	86						
	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas			Jawa Barat											
	Nilai Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (berdasarkan PMK yang berlaku)	Nilai			89	89,5	90	90,5	91						
Penelitian dan Pengembangan Peternakan															
	Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Peternakan			Jawa Barat						138.530	151.990	156.180	160.470	164.660	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (PUSLITBANGNAK)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pangan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan veteriner yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir)	Jumlah			54	56	58	60	62						
	Rasio hasil Penelitian dan pengembangan Peternakan terhadap seluruh output hasil penelitian dan pengembangan Peternakan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	%			56,8	57	57,9	58,2	60						
	Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima			Jawa Barat											
	Nilai Pembangunan zona integrasi (ZI) menuju WBK/ WBEM pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan	Nilai			86,2	86,95	87,95	88,14	88,51						
	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas			Jawa Barat											
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	Nilai Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (berdasarkan PKW yang berlaku)	Nilai			89	90,15	90,5	91,2	92						
	Temanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Tanaman Pangan									43.077	44.860	46.170	47.730	49.115	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (PUSLITBANGTP)
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Tanaman Pangan yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir)	Jumlah		Jawa Barat	18	20	20	20	18						
	Rasio hasil Penelitian dan pengembangan Tanaman Pangan terhadap seluruh output hasil penelitian dan pengembangan Tanaman Pangan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	%			98	98	98	98	98						
	Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dan Berorientasi pada Layanan Prima														



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Nilai Pembangunan zona integrasi (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	Nilai			85	85	86	86	86						
	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas			Jawa Barat											
	Nilai Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (berdasarkan PMK yang berlaku)	Nilai			95	95	96	96	97						
	Dukungan Manajemen, Instrumentasi dan Fasilitas litbang Pertanian									1.066.682	1.120.016	1.176.017	1.234.818	1.296.559	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (BALITBANGTAN)
	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima			Jawa Barat											
	Nilai Pembangunan zona integrasi (ZI) menuju WBK/WBBM pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Nilai			80	80,35	81	81,5	82						
	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas														
	Nilai Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku)	Nilai			90	90,5	91	91,5	92						
	PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PELATIHAN PERTANIAN									737.604	841.186	1.093.542	1.421.604	1.848.086	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN (BPSPDMP)
	Termanfaatkannya teknologi pertanian														
	Teknologi yang diterapkan oleh petani	%			70	74	78	82	85						
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional														
	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	%			60	65	70	75	80						
	Persentase Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%			18	19	20	21	22						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Biokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.														
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Biokrasi BPPSDMP (PMPRB)	Nilai			94,45	94,7	94,95	95,2	95,45						
	Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akurat dan berkualitas														
	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP	Nilai			90	91	92	93	94						
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian															
	Termanfaatkannya teknologi pertanian			Daerah											
	Teknologi yang diterapkan oleh petani	%			70	74	78	82	85						
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional			Daerah											
	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%			18	19	20	21	22						
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian															
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional			UPT											
	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	%			60	65	70	75	80						
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian			UPT											
	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	Skala Likert			3,9	3,91	3,92	3,93	3,94						
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP															
	Meningkatnya Nilai Reformasi Biokrasi BPPSDMP			Pusat											
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Biokrasi BPPSDMP	Nilai			94,45	94,7	94,95	95,2	95,45						
	Meningkatnya tata kelola anggaran BPPSDMP			Pusat											
	- Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Nilai			85	86	87	88	89						
	- Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP	Persen			90	91	92	93	94						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti BPPSDMP terhadap total temuan BPK atas laporan Keuangan BPPSDMP	Nilai			90	91	92	93	94						
	- Persentase Rekomendasi Revisi Laporan Keuangan BPPSDMP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Persen			90	91	92	93	94						
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan BPPSDMP			Pusat											
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Badan PPSDMP	Skala Likert			3,82	3,83	3,84	3,85	3,86						
PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN DAN UPT PENDIDIKAN										298.321	538.000	699.400	909.220	1.181.986	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN (BPPSDMP)
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional														
	Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian	Persen			65	75	80	85	90						
Pendidikan Pertanian										298.321	538.000	699.400	909.220	1.181.986	Pusat Pendidikan Pertanian
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional			UPT											
	Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian	Persen			65	75	80	85	90						
	Persentase Lembaga Pendidikan vokasi pertanian yang memiliki akreditasi minimal B	Persen			80	80	80	90	100						
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan pertanian			UPT											
	Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan pertanian	Skala Likert			3,1	3,2	3,3	3,4	3,5						
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI										1.025.728	1.056.000	1.087.000	1.120.000	1.154.000	BADAN KARANTINA PERTANIAN (BARANTAN)
	Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati														



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan.	%			90	91	92	93	94						
	Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati nabati di tempat pemasukan	%			90	91	92	93	94						
	Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan	%			50	90	91	92	93						
	Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian														
	Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan	%			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1						
	Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien														
	Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas pertanian yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	%			100	100	100	100	100						
	Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan.	%			100	100	100	100	100						
	Rasio kasus pelanggaran perkarantina yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian	%			41	42	43	44	45						
	Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima														
	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian	Nilai	22,62		2305	2327	2349	23,7	23,92						
	Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel														



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian	Nilai	89,11		89,48	89,84	90,21	90,57	90,93						
	Tersedianya Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati			Pusat						10,957	11,281	11,612	11,965	12,328	Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
	Jumlah kebijakan teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang dihasilkan sesuai kebutuhan	Jumlah kebijakan (draft, Permentan/Kepprentan/batu/revisi)			2	5	4	3	2						
		Jumlah kebijakan (draft, Permentan/Kepprentan/batu/revisi)			13	8	8	6	8						
	Meningkatnya Kemampuan Cegah Tangkal OPTK dan Keamanan Hayati Nabati			Pusat											
	Jumlah dokumen peningkatan kapabilitas cegah tangkal OPTK dan Keamanan Hayati Nabati	Jumlah birttek/monev/monev Pusat KT & KHN			5	12	12	12	12						
	Jumlah Ekspor Komoditas Karantina Tumbuhan yang ditolak negara tujuan	Jumlah Penolakan Ekspor			62	62	62	62	62						
	Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian yang dilulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	Jenis OPTK Ditemukan			65	60	60	60	65						
	Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan keamanan hayati nabati pada komoditas pertanian yang dilulintaskan di tempat pemasukan	Jumlah Kelidak sesuaian			4	5	4	5	4						
	Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan									9,347	9,623	9,905	10,206	10,516	Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan
	Tersedianya Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan			Pusat											



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah kebijakan teknis KH dan Kehani yang dihasilkan sesuai kebutuhan	Jumlah kebijakan (draft Permenian/ Kepemeranian)			2	3	1	2	1						
		Jumlah kebijakan (SK/Ka, surat, badan/ juklak/ juknis)			9	9	9	9	10						
	Meningkatnya Kemampuan Cegah Tangkal HPHK dan Keamanan Hayati Hewani			Pusat											
	Jumlah dokumen cegah tangkal HPHK dan Kehani	Jumlah bimtek/ money Pusat KH & KHH			9	13	12	13	14						
	Jumlah Ekspor Komoditas Karantina Hewan yang ditolak negara tujuan	Jumlah Penolakan Ekspor			20	20	20	20	20						
	Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian yang dialulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	Jenis HPHK Ditemukan			10	10	10	10	10						
	Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan keamanan hayati hewani pada komoditas pertanian yang dialulintaskan di tempat pemasukan	Jumlah Ketidak sesuaan			1	1	1	1	1						
Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaaan										9.454	9.733	10.019	10.323	10.637	Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaaan
	Tersedianya Kebijakan Pengawasan, Penindakan, Kerjasama & Sistem Informasi Perkarantinaaan			Pusat											
	Rasio kebijakan teknis kewasdaan yang diterbitkan sesuai kebutuhan	%			100	100	100	100	100						
	Rasio perjanjian kerjasama yang ditindakanjuit terhadap total perjanjian kerjasama perkarantinaaan yang ditandatangani	%			100	100	100	100	100						
	Tingkat ketersediaan (availability) sistem informasi perkarantinaaan per tahun	jam/ tahun			8.030	8.030	8.030	8.030	8.030						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya Dukungan Kebutuhan, Kerjasama & Informasi Perkarantinaan			Pusat											
	Rasio pendampingan kepatuhan, kerjasama dan informasi Perkarantinaan yang dilaksanakan terhadap yang dibutuhkan	%			100	100	100	100	100						
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian										18.626	19.176	19.739	20.338	20.955	Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian & Balai Uji Terap Teknik Metode Karantina Pertanian
	Tersedianya standar pengujian karantina pertanian yang sesuai kebutuhan														
	Rasio uji standar pengujian karantina sesuai kebutuhan	%		BBUSKP	100	100	100	100	100						
	Meningkatnya kualitas layanan Uji Standar Karantina Pertanian														
	Rasio pelayanan uji standar sesuai kebutuhan	%		BBUSKP	100	100	100	100	100						
	Tersedianya Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian yang Sesuai Kebutuhan														
	Rasio uji terap teknik dan metoda karantina pertanian sesuai kebutuhan	%		BUTTMKP	100	100	100	100	100						
	Meningkatnya Deseminasi Karantina Pertanian														
	Rasio metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan yang dideseminasikan dibandingkan yang dihasilkan	%		BUTTMKP	90	91	92	93	94						
	Rasio kerjasama terkait pengembangan teknik dan metode uji terap karantina pertanian yang ditindaklanjuti dibanding total kerjasama yang disepakati pada tahun berjalan	%		BUTTMKP	100	100	100	100	100						
	Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima														
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBUSKP	Nilai		BBUSKP	84,5	84,91	85,33	85,74	86,17						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan uji terap BUTTMKP	Nilai		BUTTMKP	84,5	84,91	85,33	85,74	86,17						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel														
	Nilai Kinerja Anggaran BBUSKP	Nilai	89,11	BBUSKP	89,48	89,84	90,21	90,57	90,93						
	Nilai Kinerja Anggaran BUTTMKP	Nilai	89,11	BUTTMKP	89,48	89,84	90,21	90,57	90,93						
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian															
	Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima			Pusat											
	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian (indikator biro)	Nilai	22,62		23,05	23,27	23,49	23,7	23,92						
	Rasio peraturan perkarantinaan yang dihasilkan dibanding total peraturan perkarantinaan yang dibutuhkan pada tahun berjalan	%			100	100	100	100	100						
	Rasio jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap jumlah aduan	%			90	90	90	90	90						
	Nilai SAKIP tahun sebelumnya	Nilai			86	86,1	86,2	86,3	86,4						
	Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel			Pusat											
	Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian	Nilai PMK 214/2017	89,11		89,48	89,84	90,21	90,57	90,93						
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT															
	Meningkatnya Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI)									663.564	813.735	1.079.372	1.295.697	1.566.555	BADAN KETAHANAN PANGAN (BKP)
	Persentase Lembaga Distribusi Pangan Yang Mandiri Yang Melakukan Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia/TTI	%			20	20	20	20	20						
	Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan														
	Persentase daerah rentan rawan pangan	%			18	16	14	12	10						
	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)														
	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	%			85	85	85	85	85						
	Meningkatnya konsumsi sayur, buah, daging dan protein asal ternak														



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Konsumsi Sayur dan Buah	gr/ kapita/ hari	244,3		260,2	273,2	286,9	301,3	316,3						
	Konsumsi daging	Kg/ kapita/ tahun	13,2		13,5	13,8	14,1	14,4	14,7						
	Konsumsi protein asal ternak	gr/ kapita/ hari	10,9		10,65	10,75	10,85	10,94	11,04						
	Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang efektif dan efisien														
	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Ketahanan Pangan	Nilai	23,18		23,62	23,84	24,07	24,29	24,51						
	Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan yang Akuntabel dan Berkualitas														
	Nilai Kinerja Anggaran Badan Ketahanan Pangan	Nilai	89,43		89,44	89,45	89,46	89,47	89,48						Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
Pemantauan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan										238.207	332.157	424.315	542.796	654.716	
	Meningkatnya Penjualan Beras kepada Toko Tali Indonesia (TTI)			Pusat											
	Persentase Lembaga Distribusi Pangan Yang Mandiri Yang Melakukan Penjualan Beras kepada Toko Tali Indonesia/TTI	%			20	20	20	20	20						
Pemantauan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan															Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan			Pusat											
	Persentase daerah rentan rawan pangan	%			18	16	14	12	10						
Pemantauan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan										265.216	298.352	406.755	445.354	544.660	Pusat Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)			Pusat											
	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	%			85	85	85	85	85						
	Meningkatnya konsumsi sayur, buah, daging dan protein asal ternak			Pusat											



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Konsumsi Sayur dan Buah	gr/ kapita/ hari	244,3		260,2	273,2	286,9	301,3	316,3						
	Konsumsi daging	Kg/ kapita/ tahun	13,2		13,5	13,8	14,1	14,4	14,7						
	Konsumsi protein asal ternak	gr/ kapita/ hari	10,9		10,65	10,75	10,85	10,94	11,04						
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan										107.591	112.970	118.619	124.545	130.777	Sekretariat Badan Ketahanan Pangan(BKP)
	Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima			Pusat											
	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Ketahanan Pangan	Nilai	23,18		23,62	23,84	24,07	24,29	24,51						
	Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan yang Akuntabel dan Berkualitas			Pusat											
	Nilai Kinerja Anggaran Badan Ketahanan Pangan	Nilai	89,43		89,44	89,45	89,46	89,47	89,48						
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan			Pusat											
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon III,II dan IV terhadap layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	Skala Likert			3,01	3,02	3,03	3,04	3,05						



Lampiran 3. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Sesuai amanat ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (6), Pasal 70 ayat (7), Pasal 72 ayat (2), Pasal 75, Pasal 77 ayat (2), Pasal 79 ayat (3), dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Badan Karantina Pertanian	Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	2021
2	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Sesuai amanat ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 24, Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), Pasal 46 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 ayat (3), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 70 ayat (4), Pasal 74, Pasal 81, Pasal 90, Pasal 108 ayat (3), dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2022
3	RPP tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan	Sesuai amanat ketentuan Pasal 32 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 61 ayat (4), Pasal 62 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Direktorat Jenderal Perkebunan	Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2020
4	RPerpres tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi	Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG), Peraturan Presiden tersebut berlaku untuk jangka waktu tahun 2017-2019 dan selanjutnya KSPG ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan Keputusan Presiden Nomor 5 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020 mengamalkan untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi	Badan Ketahanan Pangan	Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5	RPerpres tentang Penyuluhan Pertanian	untuk melakukan optimalisasi Penyuluhan pertanian diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020
6	RPerpres tentang Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan tindak-lanjut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) diarahkan pada penguatan Jaminan Usaha serta Korporasi Petani yang dilakukan dengan penguatan kelembagaan petani berbentuk badan usaha milik petani berbadan hukum	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sekretariat Jenderal dan Direktorat Sarana Pertanian	Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020
7	RPermentan tentang Pengawasan Produk Rekayasa Genetik	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	Sekretariat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Kementerian Hukum dan HAM	2020
8	RPermentan tentang Komando Strategi Penggilingan Padi	Untuk mengantisipasi harga gabah pada saat panen raya dilakukan penyerapan melalui usaha pengeringan dan penggilingan padi dengan pemberdayaan dan penguatan melalui Komando Strategi Penggilingan Padi	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2020
9	RPermentan tentang Perlindungan Perkebunan	untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Direktorat Jenderal Perkebunan	Kementerian Hukum dan HAM	2020

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
10	RPermentan tentang Perubahan Kedua Atas Permentan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana dan untuk meningkatkan efisiensi pengusulan peremajaan kelapa sawit, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit perlu diubah kembali	Direktorat Jenderal Perkebunan	Kementerian Hukum dan Ham	2020
11	RPermentan tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit	Adanya perkembangan tuntutan dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ ISPO)	Direktorat Jenderal Perkebunan	Kementerian Hukum dan Ham	2020
12	RPermentan tentang Fasilitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/SR.230/4/2018 tentang Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/230/4/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/SR.230/4/2018 tentang Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian telah mengatur mengenai akses pembiayaan usaha produktif sektor pertanian, dengan adanya perkembangan kredit usaha rakyat, Peraturan Menteri Pertanian tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan	2020

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
13	Rpermentan tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi	Pupuk bersubsidi yang berkaitan dengan pengadaannya, penyalurannya, dan harganya, memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara,	2020
14	Rpermentan tentang Penerapan Penanganan dan Pemasaran Biji Kakao	dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu biji kakao telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/ OT.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/ Permentan/KB.320/ 5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ OT.140/ 5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/OT.140/ 5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/ Permentan/ KB.320/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ OT.140/ 5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali	Direktorat Jenderal Perkebunan	Kementerian Hukum dan HAM	2020



INFO LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI :



**BIRO PERENCANAAN,
SEKRETARIAT JENDERAL,
KEMENTERIAN PERTANIAN RI**

Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, INDONESIA - 12550

Telp./Fax. : 021-7890625

<http://perencanaan.setjen.pertanian.go.id>

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN 2020 - 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA